



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG

**RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
PERANGKAT DAERAH**



**BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN BELITUNG
TAHUN 2025 - 2029**

KATA PENGANTAR

Dengan senantiasa bersyukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan karunia dan atas ijin-Nya Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Belitung Tahun 2025-2029 telah terealisasi. Dokumen Renstra merupakan dokumen perencanaan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Belitung.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) BKPSDM Kabupaten Belitung Tahun 2025-2029 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Renstra BKPSDM Kabupaten Belitung Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan yang memuat penetapan tujuan, sasaran strategis, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, dan subkegiatan BKPSDM Kabupaten Belitung untuk menguatkan pencapaian prioritas pembangunan daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2025-2029.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah bekerja keras dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) ini dan semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk serta memberikan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Belitung. Masukan mengenai penyempurnaan Renstra pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Belitung Tahun 2025-2029 sangat diharapkan agar kinerja lembaga ini dimasa yang akan datang dapat meningkat.

Semoga dokumen Renstra ini dapat dijadikan bahan pertimbangan serta pedoman bagi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Belitung untuk konsisten menjalankan fungsinya sebagai pengelola Kepegawaian dan Pendidikan dan Pelatihan yang selalu berupaya mengedepankan inovasi dan kreasi guna meningkatkan kinerjanya dalam melayani publik.

Tanjungpandan, September 2025

Plt. Kepala BKPSDM Kabupaten Belitung
Asisten Administrasi Umum,

Drs. SOEBAGIO
NIP 196610011995121001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Lampiran	iii
BAB I Pendahuluan	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	5
1.3. Maksud dan Tujuan	7
1.4. Sistematika Penulisan	8
BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	
2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	10
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah	10
2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	19
2.1.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perangkat Daerah	29
2.1.4 Indikator Kinerja Kunci (IKK) BKPSDM Kab. Belitung	39
2.1.5 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah	42
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	42
2.2.1 Permasalahan Pelayanan BKPSDM Kabupaten Belitung	43
2.2.2 Isu Strategis	43
BAB III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan	
3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra BKPSDM Kab. Belitung	44
3.2. Strategi Renstra BKPSDM Kab. Belitung	49
3.3. Arah Kebijakan Renstra BKPSDM Kab. Belitung	49
BAB IV Program, Kegiatan, Subkegiatan, Dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	
4.1. Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Perangkat Daerah	51
4.2. Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan	65
4.3. Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	70
4.4. Indikator Kinerja Utama BKPSDM Kab. Belitung Tahun 2025 – 2030	73
4.5. Indikator Kinerja Kunci BKPSDM Kab. Belitung Tahun 2025 – 2030	74
BAB V Penutup	75
Lampiran	77

DAFTAR LAMPIRAN

- Tabel 3.3 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran
- Tabel 4.1 Program Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Belitung
- Tabel 4.2 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan
- Tabel 4.3 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan
- Tabel 4.3 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan Per Lokasi dan Pendanaan
- Tabel 4.3 Indikator Kinerja Daerah
- Tabel 4.4 Daftar Subkegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah
- Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama
- Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci



BUPATI BELITUNG

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG

NOMOR 30 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan dengan memperhatikan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, perlu menetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang....

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

9. Peraturan....

9. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 24), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2024 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 95);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 99);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung.
3. Bupati adalah Bupati Belitung.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra adalah Dokumen Perencanaan Jangka Menengah Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 dan

Rencana....

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.
8. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua sumber daya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
9. Sub Kegiatan adalah bentuk aktivitas Kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB II

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
- (3) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

BAB....

BAB III
SISTEMATIKA RENSTRA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

Pasal 3

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I : Pendahuluan.
- b. BAB II : Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat.
- c. BAB III : Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan.
- d. BAB IV : Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.
- e. BAB V : Penutup.

Pasal 4

(1) Renstra disusun oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan.

(2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

1. Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung;
2. Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung;
3. Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Belitung;
4. Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Belitung;
5. Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung;
6. Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Belitung;
7. Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belitung;
8. Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung;
9. Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung;
10. Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung;

11. Rencana....

11. Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung;
12. Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung;
13. Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung;
14. Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitung;
15. Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung;
16. Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung;
17. Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Perindustrian Kabupaten Belitung;
18. Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung;
19. Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Belitung;
20. Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Belitung;
21. Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Belitung;
22. Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung;
23. Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Belitung;
24. Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Belitung;
25. Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung;
26. Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belitung;
27. Rencana Strategis Kecamatan Tanjungpandan;
28. Rencana Strategis Kecamatan Badau;
29. Rencana Strategis Kecamatan Sijuk;
30. Rencana Strategis Kecamatan Membalong;
31. Rencana Strategis Kecamatan Selat Nasik;

(3)Renstra....

- (3) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung.

Ditetapkan di Tanjungpandan
pada tanggal 12 September 2025
BUPATI BELITUNG,

ttd.

DJONI ALAMSYAH HIDAYAT

Diundangkan di Tanjungpandan
pada tanggal 12 September 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG,

ttd.

MARZUKI

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2025 NOMOR 30

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



[Handwritten signature]
WIGMAN WUDIE SETIAWAN, S.H., M.Si.
NIP. 19720607 200003 1 004

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana strategi (Renstra) adalah dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai yang di dalamnya dijelaskan mengenai strategi atau arahan sebagai dasar dalam mengambil keputusan organisasi. Perangkat Daerah wajib menyusun dokumen perencanaan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) yang memuat, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas fungsinya secara lebih spesifik dan terukur serta dilengkapi dengan sasaran yang hendak dicapai sebagai perwujudan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang memberikan landasan bagi berbagai bentuk perencanaan dari pusat hingga daerah.

Adapun ketentuan mengenai tata cara penyusunan Renstra-PD telah diatur dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang merupakan pedoman pelaksanaan yang wajib diacu oleh seluruh Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra-PD.

Perangkat Daerah merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi misi organisasi. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku bahwa setiap Perangkat Daerah perlu menyusun Rencana Strategis sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah.

Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Berkenaan dalam tenggat penyusunannya, maka Sebagaimana diatur dalam Pasal 264 ayat (4) Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa “Perda tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik”. Mempertimbangkan landasan normatif sebagaimana dijelaskan di atas maka dalam rangka mewujudkan keselarasan perencanaan pembangunan daerah sebagai kesinambungan proses politik daerah yang digelar secara serentak pada pemilihan kepala daerah pada bulan November tahun 2024 dan pelantikan kepala daerah terpilih pada 20 Februari 2025 maka disusunlah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2025-2029.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RENSTRA PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Dokumen Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Belitung Tahun 2025-2029 sebagai sebuah Rencana Strategis Perangkat Daerah disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Belitung serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Belitung Tahun 2025-2029. Proses penyusunan Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Belitung Tahun 2025-2029 didasarkan pada kebutuhan dan penjarangan aspirasi melalui Orientasi dan Focus Group Discussion (FGD) Perangkat Daerah yang melibatkan pegawai dilingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya manusia Kabupaten Belitung serta stakeholders terkait dengan cara yang sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Terkait dengan pelaksanaan peningkatan reformasi birokrasi khususnya reformasi sumber daya aparatur dilingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung sangat diperlukan adanya peningkatan manajemen ASN yang mampu mendukung pembangunan tata kelola pemerintahan yang BERAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif), sehingga perlu dibangun Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki kemampuan serta daya saing yang semakin tinggi dan semakin mampu melaksanakan pencapaian tujuan dan program Pemerintah Daerah.

Dokumen Renstra ini merupakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Belitung Tahun 2025 - 2029 yang dalam pelaksanaannya akan dijabarkan dan menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang akan disusun setiap tahun sebagai Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah, yang selanjutnya ditetapkan sebagai Rencana Kerja (RENJA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Belitung dan dijabarkan dalam sasaran-sasaran pokok yang harus dicapai, arah kebijakan program-program pembangunan dan kegiatan pokok sehingga merupakan dokumen perencanaan yang memberikan arahan, memudahkan tujuan yang hendak dicapai sesuai dengan visi Bupati/Wakil Bupati Belitung sebagai pimpinan pemerintahan berdasarkan RPJMD kabupaten Belitung Tahun 2025-2029 adalah :

**”Belitung Maju, Inovatif dan Berkelanjutan Sebagai Maritim
Kawasan Barat dengan Infrastruktur Modern untuk Menuju
Masyarakat Sejahtera”**

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Belitung berdasarkan Peraturan Bupati Belitung Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Belitung, BKPSDM Kabupaten Belitung merupakan Unsur Penunjang pemerintahan bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang dipimpin oleh Kepala Badan yang

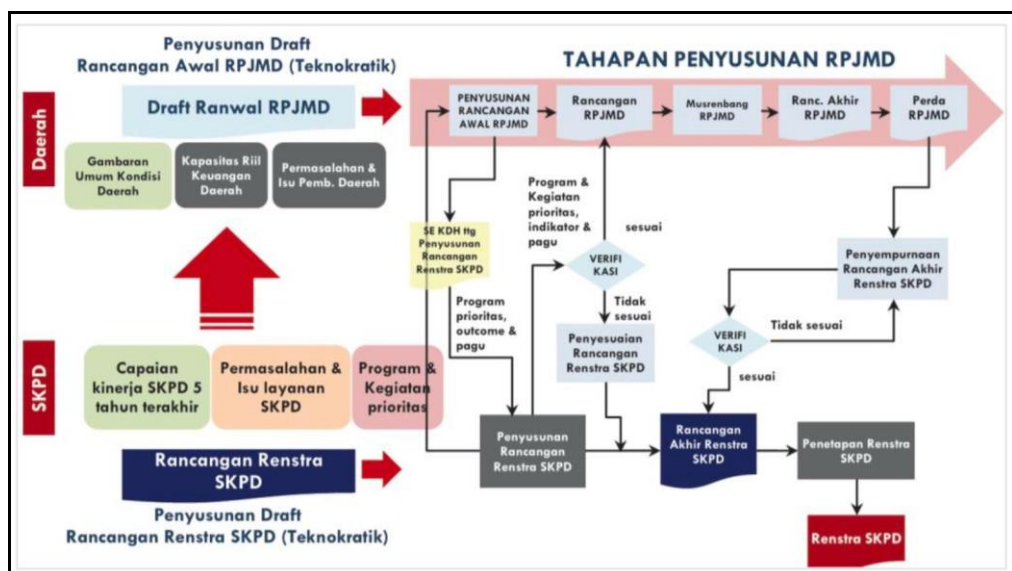
berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Maka dari misi Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2025-2029 Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Belitung mengemban misi ketiga yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah, Bersih dan Bermartabat.

Perencanaan Pembangunan Nasional dan PP Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyiapkan Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD.

Renstra PD memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintah Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian Evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, mengatur tahapan penyusunan Renstra yang terdiri dari :

- a) Persiapan penyusunan;
- b) Penyusunan rancangan awal;
- c) Penyusunan rancangan;
- d) Pelaksanaan forum PD/lintas PD;
- e) Perumusan rancangan akhir; dan
- f) Penetapan;

Gambar 1.1
Keterkaitan Tahapan Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah



1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Landasan hukum yang menjadi dasar penyusunan Renstra BKPSDM Kabupaten Belitung Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
5. Undang - Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Belitung di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6951);
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi, Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Srategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 24), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2024 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 95);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitung Tahun 2014 - 2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 8);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2024 Nomor 11);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 99);
21. Peraturan Bupati Belitung Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Belitung;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan penyusunan Renstra Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Belitung Tahun 2025-2029, sebagai berikut :

- a. Sebagai dokumen operasional yang menjabarkan Visi, Misi, dan Tujuan Pembangunan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Belitung;
- b. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Belitung dalam merumuskan program, kegiatan, dan anggaran yang akan dilaksanakan;
- c. Peningkatan akuntabilitas kinerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Belitung yang memuat Indikator Kinerja terukur, sehingga memungkinkan evaluasi dan pemantauan terhadap kinerja dinas;
- d. Mengidentifikasi kebutuhan sumber daya (Manusia, Anggaran, Sarana Prasarana) secara lebih tepat;
- e. Menyediakan data dan Informasi yang komprehensif mengenai kondisi Kepegawaian di kabupaten, termasuk tantangan dan peluang dalam mengambil kebijakan dan keputusan yang tepat dalam meningkatkan profesionalitas ASN;
- f. Merumuskan strategi dan program yang responsif terhadap isu-isu strategis dan tantangan yang dihadapi dalam peningkatan profesionalitas ASN;

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyusunan Renstra BKPSDM Kabupaten Belitung Tahun 2025 – 2029 terdiri dari 5 (lima) Bab sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Subbab gambaran pelayanan perangkat daerah paling sedikit memuat :
 - a. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah;
 - b. Sumber daya perangkat daerah;
 - c. Pelayanan kinerja perangkat daerah; dan

- d. Kelompok sasaran layanan
- 2.2 Subbab permasalahan dan isu strategis perangkat daerah paling sedikit memuat :
 - a. Permasalahan pelayanan perangkat daerah; dan
 - b. Isu strategis

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029
- 3.2 Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025 – 2029
- 3.3 Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025 – 2029

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- 4.1 Uraian Program
- 4.2 Uraian Kegiatan
- 4.3 Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator target dan pagu indikatif
- 4.4 Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah
- 4.5 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah
- 4.6 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan paling substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Belitung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 4 Tahun 2019.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, yang melaksanakan fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan di bidang kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan.

2.1.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Peraturan Bupati Belitung Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Belitung dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Badan mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1) Tugas dan Fungsi

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan manajemen ASN. Disamping itu Badan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan persiapan, pengumpulan bahan dan informasi serta sarana dan prasarana dalam rangka penyusunan kebijakan, rencana

- program kerja bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
- b. Pelaksanaan penghimpunan, pengkajian dan penyiapan penyusunan produk hukum daerah serta kebijakan teknis manajemen ASN sesuai dengan norma, standard dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
 - c. Pelaksanaan penyusunan formasi, pengadaan, perpindahan, pengurusan kenaikan pangkat, promosi, pembinaan dan disiplin, pengembangan sumber daya manusia, penilaian kinerja, kesejahteraan dan pensiun;
 - d. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Informasi ASN; dan
 - e. Pelaksanaan fasilitasi profesi ASN.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. Penghimpunan, pengkajian dan penyiapan penyusunan produk hukum daerah serta kebijakan teknis manajemen ASN sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- b. Penyelenggaraan manajemen ASN meliputi penyusunan formasi, pengadaan, perpindahan, pengurusan kenaikan pangkat, promosi, pembinaan dan disiplin, pengembangan sumber daya manusia, penilaian kinerja, kesejahteraan dan pensiun;
- c. Penyelenggaraan informasi Pegawai ASN serta pengelolaan dan pengembangan Sistem Informasi ASN;
- d. Penyelenggaraan fasilitasi profesi ASN;
- e. Pemantuan, evaluasi dan pelaporan di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
- f. Pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

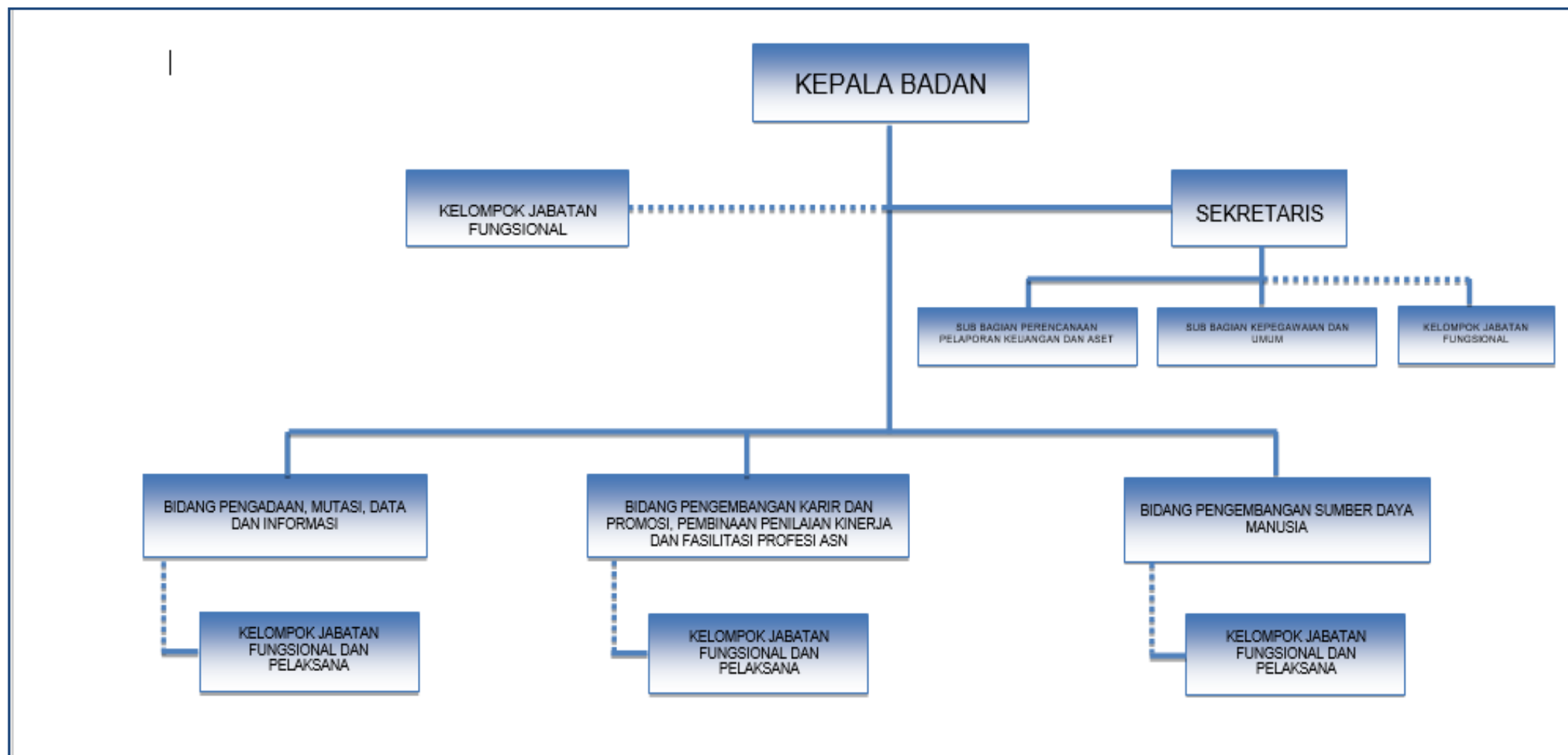
2) Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Belitung, terdiri atas :

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan, Keuangan dan Aset;
 2. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional
- c. Bidang Pengadaan, Mutasi, Data dan Informasi
- d. Bidang Pengembangan Karir dan Promosi, Pembinaan, Penilaian Kinerja dan Fasilitasi Profesi ASN
- e. Bidang Pengembangan Sumber daya manusia
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 2.1.1 Struktur Organisasi

Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Belitung



Untuk tugas dan fungsi dibawah Kepala Badan adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat

Tugas : Membantu Kepala Badan dalam memberikan pelayanan administrative di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Fungsi : a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program kegiatan dan anggaran serta evaluasi dan pelaporan;
b. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rancangan produk hukum di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
c. pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset;
d. pengelolaan umum dan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga, dan urusan ASN;
e. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Bidang Pengadaan, Mutasi, Data dan Informasi

Tugas : Melaksanakan sebagian tugas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam perencanaan, pengoordinasian, pelaporan dalam pelaksanaan penyusunan formasi, pengadaan, pengangkatan, penempatan, pemindahan, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, pensiun, pengelolaan dan pengembangan sistem informasi ASN sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Fungsi : a. penyusunan program kerja Bidang Pengadaan, Mutasi, Kepangkatan dan Pensiun, dan Data dan Informasi;
b. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan pengadaan ASN;
c. penyiapan bahan dan pelaksanaan penyusunan formasi, pengadaan dan pengangkatan ASN;
d. penghimpunan dan penelaahan peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-

- bahan lain yang berhubungan dengan perencanaan, pengadaan dan pengangkatan ASN;
- e. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan mutasi, kepangkatan dan pensiun;
 - f. penyiapan bahan dan pelaksanaan penempatan, pemindahan, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, penyesuaian masa kerja, peningkatan pendidikan dan pensiun;
 - g. penghimpunan dan penelaahan peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan pemindahan dan kenaikan pangkat ASN;
 - h. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan perencanaan, pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi ASN;
 - i. penyiapan bahan pengurusan Kartu Pegawai, Kartu Suami, Kartu Isteri, Kartu Taspen, Konversi Nomor Induk Pegawai dan identitas kepegawaian lainnya;
 - j. pelaksanaan evaluasi, pelaporan dan pendokumentasian kegiatan di bidang tugasnya;
 - k. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
 - l. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Pengembangan Karir dan Promosi, Pembinaan, Penilaian Kinerja dan Fasilitasi Profesi ASN

Tugas : Melaksanakan perencanaan, pengkoordinasian, pelaporan dalam pelaksanaan promosi dan pengembangan karir, pembinaan, penilaian kinerja, pembinaan dan fasilitasi profesi dan penghargaan ASN, penegakan disiplin serta kedudukan hukum sesuai dengan norma, standard an prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

Fungsi : a. penyiapan bahan penyusunan program kerja bidang Pengembangan Karir dan Promosi, Pembinaan dan Penilaian Kinerja ASN, dan Fasilitasi Profesi dan

- Penghargaan ASN;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pengembangan karir dan promosi;
 - c. penyiapan bahan pedoman penyusunan pola karir dan daftar urutan kepangkatan;
 - d. penyiapan bahan, perencanaan, pelaksanaan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan karir, promosi dan penyusunan pola karir ASN;
 - e. penghimpunan dan penelaahan peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan pengembangan karir dan penyusunan pola karir, pembinaan, kinerja dan penegakan disiplin serta kedudukan hukum ASN;
 - f. penyiapan bahan koordinasi pembinaan dan penilaian kinerja ASN;
 - g. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan dan penilaian kinerja ASN;
 - h. penyiapan bahan pedoman penegakan disiplin dan kedudukan hukum ASN;
 - i. penyiapan bahan perlindungan bantuan hukum dan advokasi terhadap dugaan pelanggaran sistem merit dan masalah hukum dalam melaksanakan tugas;
 - j. penyiapan bahan rekomendasi kepada majelis kode etik instansi terhadap pelanggaran kode etik profesi dan kode perilaku profesi;
 - k. penyiapan bahan penyelenggaraan usaha-usaha untuk peningkatan kesejahteraan anggota korps profesi ASN sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - l. penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan administrasi dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi korps profesi ASN tingkat kabupaten;
 - m. penyiapan bahan yang berkaitan dengan pemberian tunjangan, cuti, penghargaan, tanda jasa, kesejahteraan dan pembekalan bagi ASN menjelang pensiun;
 - n. pelaksanaan, pengoordinasian, pengendalian dan

- pengawasan program kerja Fasilitasi Profesi dan Penghargaan ASN;
- o. pelaksanaan evaluasi, pelaporan dan pendokumentasian kegiatan di bidang tugasnya
 - p. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
 - q. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia

Tugas : Merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan, mengevaluasi, dan melaporkan penyelenggaraan dan pengembangan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kompetensi sumber daya manusia;

- Fungsi :
- a. penyiapan bahan penyusunan program kerja bidang diklat penjenjangan, diklat teknis fungsional dan Pengembangan Kompetensi dan Sertifikasi;
 - b. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan diklat dasar Calon Pegawai Negeri Sipil dan diklat penjenjangan, diklat teknis dan fungsional;
 - c. penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi tenaga pengajar, peserta dan bahan pengajaran diklat dasar Calon Pegawai Negeri Sipil dan diklat penjenjangan;
 - d. penyiapan bahan penataan kebutuhan diklat dasar Calon Pegawai Negeri Sipil dan diklat penjenjangan;
 - e. penyiapan bahan pelayanan dan pengelolaan administrasi diklat dasar Calon Pegawai Negeri Sipil dan seleksi diklat penjenjangan;
 - f. penyiapan bahan koordinasi dan kerja sama peningkatan kualifikasi pendidikan bagi sumber daya manusia di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung;
 - g. pelaksanaan pelayanan dan pengelolaan administrasi diklat dasar Calon Pegawai Negeri Sipil, diklat penjenjangan dan peningkatan kualifikasi pendidikan sumber daya manusia;
 - h. penyiapan bahan koordinasi dan kerja sama dengan

- lembaga diklat Pemerintah dan/atau lembaga Pemerintah lainnya dalam penyelenggaraan diklat dasar Calon Pegawai Negeri Sipil, diklat penjurangan dan/atau pendidikan kedinasan lainnya;
- i. pelaksanaan pendataan/inventarisasi alumni diklat penjurangan sesuai dengan kompetensi dan aparatur yang telah mengikuti peningkatan kualifikasi pendidikan;
 - j. penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi tenaga pengajar, peserta dan bahan pengajaran diklat teknis dan fungsional;
 - k. penyiapan bahan pengelolaan administrasi dan fasilitasi pelaksanaan diklat teknis dan fungsional;
 - l. penyiapan bahan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga diklat pemerintah dan/atau lembaga pemerintah lainnya dalam rangka penyelenggaraan diklat teknis dan fungsional;
 - m. penyiapan bahan pendataan/inventarisasi alumni diklat teknis dan fungsional sesuai dengan kompetensi;
 - n. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan program serta penyusunan laporan dan dokumentasi diklat teknis dan fungsional;
 - o. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan pengembangan kompetensi dan sertifikasi aparatur;
 - p. penyiapan bahan analisis kebutuhan pengembangan kompetensi dan sertifikasi aparatur;
 - q. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi dan sertifikasi aparatur;
 - r. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
 - s. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Jumlah tenaga fungsional ditetapkan sesuai kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BKPSDM Kabupaten Belitung secara optimal sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten, sarana dan prasarana, anggaran yang proporsional dan memadai serta Standar Operasional Prosedur (SOP).

1) Sumber Daya Aparatur PD

Pegawai sebagai Sumber Daya Aparatur merupakan salah satu modal organisasi, yang menempati posisi strategis dan peran dominan dalam membawa BKPSDM mencapai tujuannya. Tujuan BKPSDM hanya akan terwujud apabila didukung oleh aparatur yang handal dan profesional.

Demikian penting dan strategisnya peran pegawai/aparatur ini, menuntut diselenggarakannya manajemen sumber daya manusia secara baik, tepat dan terarah, sehingga mereka dapat memberikan kontribusi positif bagi kemajuan dan efektifitas pada BKPSDM Kabupaten Belitung.

Berdasarkan data kepegawaian Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Belitung pada bulan Juli 2025, jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah sebanyak 41 pegawai, yang terdiri dari 25 pegawai laki-laki (60,98 %) dan 16 pegawai perempuan (39,02 %). Berdasarkan jenjang pendidikan, untuk ASN BKPSDM Kabupaten Belitung terdiri dari lulusan S2, S1, dan D3

dengan jumlah total sebanyak 39 orang (95,2 %), lulusan SMA sebanyak 1 orang (2,4 %) dan SD sebanyak 1 orang (2,4 %). Jumlah dan komposisi pegawai pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Belitung per Juli 2025, selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Data Pegawai BKPSDM Kabupaten Belitung Tahun 2025

No.	Unit Kerja	Jumlah		Keterangan
		Lk	Pr	
1.	Kepala BKPSDM	1	-	
2.	Sekretaris	1	-	
	1. Kasubbag Perencanaan, Pelaporan, Keuangan dan Aset	-	1	
	2. Kasubbag Kepegawaian dan Umum	1	-	
	3. Fungsional Arsiparis	1	-	
	4. Penelaah Teknis Kebijakan	1	3	
	5. Pengadministrasi Perkantoran	1	-	
	6. Pranata Komputer	-	1	PPPK
	7. Pengelola Layanan Operasional	1	-	PPPK
	8. Pengelola Umum Operasional	1	-	PPPK
	9. Petugas Kebersihan, Penjaga Malam, Sopir	3	1	Non ASN
3.	Kepala Bidang Pengadaan, Mutasi, Data dan Informasi	1	-	
	1. Analisis SDM Aparatur Ahli Muda	2	-	
	2. Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama	1	1	
	3. Pranata SDM Aparatur Mahir	1	-	
	4. Pranata Komputer Ahli Muda	1	-	
	5. Pranata Komputer Ahli Pertama	-	1	
	6. Penelaah Teknis Kebijakan	1	-	
	7. Pengelola Data dan Informasi	-	1	
	8. Pengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian	1	-	Tugas Belajar
4.	Kepala Bidang Pengembangan Karir dan Promosi, Pembinaan, Penilaian Kinerja dan Fasilitasi Profesi ASN	1	-	
	1. Analisis SDM Aparatur Ahli Muda	3	-	
	2. Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama	1	1	
	3. Penelaah Teknis Kebijakan	1	1	
	4. Pengelola Data dan Informasi	-	1	
5.	Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	1	-	
	1. Analisis SDM Aparatur Ahli Muda	1	2	
	2. Penelaah Teknis Kebijakan	1	1	
	3. Asesor SDM Aparatur Ahli Pertama	-	2	
Jumlah		28	17	Total : 45

Sumber : Subbag Kepegawaian dan Umum BKPSDM Kab. Belitung per Juli 2025

a. Berdasarkan Golongan Ruang

Tabel 2.2
Data Pegawai BKPSDM berdasarkan Golongan Ruang Tahun 2020-2024

No.	Golongan Ruang	Tahun														
		2020			2021			2022			2023			2024		
		Jml	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P
1.	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	II	7	4	3	7	4	3	3	2	1	1	1	-	1	1	-
3.	III	33	21	12	31	20	11	34	21	13	34	20	14	34	20	14
4.	IV	2	2	-	1	1	-	3	2	1	2	2	-	2	2	-
5.	VII (PPPK)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1
Jumlah		42	27	15	39	25	14	40	25	15	38	23	15	38	23	15

Sumber : Simpeg Kab.belitung

Tabel 2.3
Data Pegawai BKPSDM berdasarkan Golongan

No.	Golongan Ruang	Jumlah	L	P
1.	I	-	-	-
2.	II	1	1	-
3.	III	34	19	15
4.	IV	3	3	-
5.	VII (PPPK)	2	1	1
6.	I (PPPK)	1	1	-
Jumlah		41	25	16

Sumber : Subbag Kepegawaian dan Umum BKPSDM Kab. Belitung per Juli 2025

b. Berdasarkan Golongan dan Pendidikan Terakhir

Tabel 2.4
Data Pegawai BKPSDM berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2020-2024

Tingkat Pendidikan	Tahun									
	2020		2021		2022		2023		2024	
	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr
S2	1	-	1	-	1	-	2	-	2	-
S1	13	11	14	10	15	12	14	10	14	10
DIV	4	-	3	-	4	-	3	-	3	-
DIII	5	2	3	2	2	2	2	4	2	4
SMA/SMK	4	2	4	2	3	1	2	1	2	1
Jumlah	27	15	25	14	25	15	23	15	23	15

Sumber : Simpeg Kab. Belitung

Tabel 2.5
Data Pegawai BKPSDM berdasarkan Golongan dan Pendidikan Terakhir Tahun 2025

Golongan PNS/PPPK	Tingkat Pendidikan											
	S 2		S 1		DIV		DIII		SMA/SMK		SD	
	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr
PNS Gol. IV	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
PNS Gol. III	2	1	11	11	4	-	2	3	-	-	-	-
PNS Gol. II	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
PNS Gol. I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PPPK Gol. VII	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
PPPK Gol. I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Jumlah	3	1	12	11	5	-	3	4	1	-	1	-

Sumber : Subbag Kepegawaian dan Umum BKPSDM per Juli 2025

c. Berdasarkan Diklat Penjenjangan

Tabel 2.6
Data Pegawai BKPSDM Yang Telah Mengikuti Diklat Penjenjangan dan Diklat Teknis Tahun 2020-2024

No.	Jenis Diklat	Tahun									
		2020		2021		2022		2023		2024	
		Jml Jab.	Ytm	Jml Jab.	Ytm	Jml Jab.	Ytm	Jml Jab.	Ytm	Jml Jab.	Ytm
1.	Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk. II (PKN)	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-
2.	Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA)	4	1	4	1	3	-	4	-	4	1
3.	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP)	11	5	2	-	2	-	2	-	2	-
4.	Diklat Fungsional	8	7	17	16	17	17	15	15	16	16

Sumber : Subbag Kepegawaian dan Umum BKPSDM Kab. Belitung
Ket : (Jml Jab.= Jumlah Jabatan, Ytm = Yang telah mengikuti)

Tabel 2.7
Data Pegawai BKPSDM berdasarkan Diklat Penjenjangan dan Diklat Teknis

No.	Jenis Diklat	Jumlah Pegawai	Yang Telah Mengikuti dan Lulus	Yang Belum Mengikuti	Ket.
1.	Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk. II (PKN)	1	-	1	-
2.	Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA)	4	-	4	-
3.	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP)	2	-	2	-
4.	Diklat Fungsional	16	16	-	-
5.	Diklat Barang dan Jasa	37	13	24	-

Sumber : Subbag Kepegawaian dan Umum BKPSDM per Mei 2025

2) **Data Kepegawaian Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2020 - 2024**

Tabel 2.8
Rekapitulasi Jumlah PNS Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2020-2024

No.	Tahun	Jumlah PNS	Laki-Laki	Perempuan
1.	2020	3.213	1.394	1.819
2.	2021	3.235	1.364	1.871
3.	2022	3.141	1.309	1.832
4.	2023	3.016	1.247	1.769
5.	2024	2.863	1.174	1.689

Sumber : Simpeg Kabupaten Belitung

Tabel 2.9
Rekapitulasi Jumlah PPPK Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2020-2024 dan Tahun 2025

No.	Tahun	Jumlah PPPK	Laki-Laki	Perempuan	Keterangan
1.	2020	-	-	-	-
2.	2021	13	9	4	Formasi Tahun 2020
3.	2022	128	34	94	Formasi Tahun 2021
4.	2023	147	32	115	Formasi Tahun 2022
5.	2024	139	49	90	Formasi Tahun 2023
6.	2025	228	95	133	Formasi Tahun 2024 (Tahap I)
7.	2025	101	34	67	Formasi Tahun 2024 (Tahap II)

Sumber : Bidang Pengadaan BKPSDM Kab. Belitung

Tabel 2.10
Rekapitulasi Jumlah PNS Pemerintah Kabupaten Belitung Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2020-2024

No.	Tahun	Jumlah Pegawai	Tingkat Pendidikan									
			SD	SMP	SMA/SMK	D1	DII	DIII	DIV	S1	S2	S3
1.	2020	3.213	7	30	484	14	87	639	46	1.811	95	-
2.	2021	3.235	6	26	409	12	82	671	51	1.886	92	-
3.	2022	3.141	5	21	331	11	62	680	55	1.877	99	-
4.	2023	3.016	5	18	276	9	48	651	56	1.842	110	1
5.	2024	2.863	4	13	222	7	39	640	55	1.766	116	1

Sumber : Simpeg Kabupaten Belitung

Tabel 2.11
Rekapitulasi Jabatan Struktural Pemerintah Kabupaten Belitung
Tahun 2020-2024

No.	Tahun	Jumlah Jabatan	Jabatan Terisi			Jabatan Kosong
			Jumlah	Laki-Laki	Perempuan	
1.	2020	632	528	346	182	104
2.	2021	632	302	204	98	330
3.	2022	632	275	188	87	357
4.	2023	637	343	234	109	294
5.	2024	637	317	217	100	320

Sumber : Simpeg Kabupaten Belitung

Tabel 2.12
Rekapitulasi Jumlah PNS Pemerintah Kabupaten Belitung
Berdasarkan Jabatan Fungsional Tertentu (JFT)
Tahun 2020-2024

No.	Tahun	Jabatan Fungsional Tertentu (JFT)	
		Guru	Non-Guru
1.	2020	1.091	821
2.	2021	1.038	1.022
3.	2022	969	1.033
4.	2023	1.167	984
5.	2024	1.083	971

Sumber : Simpeg Kabupaten Belitung

Tabel 2.13
Data Tugas Belajar PNS Pemerintah Kabupaten Belitung
Tahun 2020-2024

No.	Tahun	Sumber Pembiayaan											
		APBD			APBN / Cost Sharing			Mandiri Meninggalkan Tugas			Mandiri Tidak Meninggalkan Tugas		
		S1	S2	Dokter Spesialis	S1	S2	Dokter Spesialis	S1	S2	Dokter Spesialis	S1	S2	Dokter Spesialis
1.	2020	4	-	2	8	2	4	-	-	-	-	-	-
2.	2021	4	5	2	1	2	3	-	-	-	-	-	-
3.	2022	3	1	3	1	2	2	2	1	6	3	2	-
4.	2023	2	14	4	1	1	8	2	2	2	26	7	-
5.	2024	3	11	4	-	1	7	4	2	2	26	7	-

Sumber : Bidang SDM BKPSDM Kabupaten Belitung

3) Sumber Daya Aset / Sarana dan Prasarana

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, BKPSDM Kabupaten Belitung didukung oleh sarana dan prasarana berupa aset/barang inventaris yang merupakan hasil perolehan dari pengadaan periode sebelumnya. Rekapitulasi hasil sensus terhadap inventaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Belitung tergambar pada tabel berikut :

Tabel 2.14

**Rekapitulasi Sarana dan Prasarana BKPSDM Kabupaten Belitung
Sampai dengan Bulan Agustus Tahun 2025**

No.	Jenis Barang	Satuan	Jumlah yang ada	Keterangan Kondisi	Jumlah Kebutuhan	Keterangan
A.	Tanah					
1.	Tanah	Unit	2	Baik	2	1 unit eks. Diklat akan digunakan untuk Asesmen Center
B.	Peralatan dan Mesin					
a.	Alat-Alat Angkutan					
1.	Kendaraan Roda Empat	Unit	4	3 Baik, 1 Rusak berat	4	
2.	Kendaraan Roda Dua	Unit	19	18 Baik, 1 Rusak berat	18	
b.	Alat Bengkel dan Alat Ukur					
1.	Perkakas bengkel listrik lainnya	Unit	1			
c.	Alat Kantor dan Rumah Tangga					
1.	Mesin Ketik Manual Portable	Unit	1			
2.	Mesin Ketik Manual Standar	Unit	1	Rusak Berat		
3.	Mesin Ketik Manual Langewagon	Unit	6	6 Rusak Berat		
4.	Mesin Ketik Listrik	Unit	2	Rusak		
5.	Mesin Hitung Elektronik/Kalkulator	Unit	1	Rusak		
6.	Lemari Besi/Metal	Buah	16			
7.	Lemari Kayu	Buah	10			
8.	Rak Besi	Buah	20	4 Rusak Berat		
9.	Rak Kayu	Buah	7	3 Rusak Berat		
10.	Filing Cabinet Besi	Buah	66	10 Rusak Berat		
12.	Filing Cabinet Kayu	Buah	2			
13.	Brandkas	Buah	2			
14.	Locker	Unit	4			
15.	Lemari Kaca	Buah	3	3 Rusak Berat		
16.	Papan Visual/Papan Nama	Unit	3	3 Rusak Berat		
17.	White Board	Unit	6	1 Rusak Berat		
18.	Mesin Absensi	Unit	16			
19.	LCD Projector/Infocus	Unit	3			
20.	Papan Nama Instansi	Unit	2			
21.	Papan Pengumuman	Buah	1			
22.	Teralis	Unit	125			
23.	Alat Kantor Lainnya (Logo Pemda & Huruf BKD)	Unit	1			
24.	Kursi Besi/Metal	Buah	3	3 Rusak Berat		
25.	Kursi Kayu	Buah	2	2 Kurang Baik		
26.	Meja Rapat	Buah	1			
27.	Tempat Tidur Kayu	Buah	24			
28.	Meja Ketik	Buah	1	1 Rusak Berat		
29.	Meja Resepsionis	Buah	1			
30.	Meja Panjang	Buah	5			
31.	Meja ½ Biro	Buah	92	31 Rusak Berat		
32.	Meja Makan Besi	Buah	3			
33.	Kursi Rapat	Buah	45			
34.	Kursi Tamu	Buah	5	1 Rusak Berat		
35.	Kursi Putar	Buah	106	27 Rusak Berat		
36.	Kursi Biasa	Buah	117	2 Rusak Berat		
37.	Kursi Lipat	Buah	251	48 Rusak Berat		

No.	Jenis Barang	Satuan	Jumlah yang ada	Keterangan Kondisi	Jumlah Kebutuhan	Keterangan
38.	Meja Komputer	Unit	77	3 Rusak Berat		
39.	Sofa	Unit	4			
40.	Meubelair Lainnya	Unit	7	5 Rusak Berat		
41.	Vacuum Cleaner	Unit	1			
42.	Mesin Cuci	Unit	1			
43.	AC Window	Unit	2			
44.	A.C. Split	Unit	31	6 Rusak Berat		
45.	Kipas Angin	Unit	9	6 Rusak Berat		
46.	Televisi	Unit	3			
47.	Sound System	Unit	3			
48.	Wireless	Unit	2			
49.	Megaphone/TOA	Unit	1			
50.	Microphone	Unit	1			
51.	Microphone Floor Stand	Unit	1			
52.	Microphone Table Stand	Unit	1			
53.	Unit Power Supply	Unit	88	14 Rusak Berat		
54.	Stabilisator	Unit	5			
55.	Camera Film	Unit	1			
56.	Tangga Alumunium	Unit	1			
57.	Dispenser	Buah	1			
58.	Mimbar/Podium	Unit	1			
59.	Handy Cam	Unit	1			
60.	Vertikal Blind	Unit	112			
61.	Alat Rumah Tangga Lain-lain	Unit	95			
62.	Alat Pemadam/Portable	Unit	2			
63.	Meja Kerja Pejabat Eselon III	Buah	1			
64.	Meja Tamu Biasa	Buah	1	1 Rusak Berat		
65.	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	Buah	1			
66.	Lemari Buku Arsip untuk Arsip Dinamis	Buah	2			
d.	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar					
1.	Microphone/Wireless MIC	Unit	1			
2.	UPS	Unit	4			
3.	AVR	Unit	8	8 Rusak Berat		
4.	Digital Audio Taperecorder	Unit	1			
5.	Peralatan Studio Audio Lainnya	Unit	6			
6.	Camera Electronic	Unit	2			
7.	Film Projector	Unit	1	1 Rusak Berat		
8.	Lensa Kamera	Unit	1			
9.	Layar Film/Projector	Unit	10	2 Rusak Berat		
10.	Peralatan Cetak Lainnya	Unit	2			
11.	Telephone (PABX)	Unit	2	1 Rusak Berat		
12.	Intermediate Telephone	Unit	1			
13.	Pesawat Telephone	Unit	5	2 Rusak Berat		
14.	Facsimili	Unit	1			
15.	Slide Projector (Lapangan)	Unit	2			
16.	Mast Tower	Unit				
e.	Komputer					
1.	PC Unit	Unit	101	13 Rusak Berat, 60 Rusak		
2.	Laptop	Unit	26			
3.	Note Book	Unit	55	2 Rusak Berat, 8 Rusak		
4.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Unit	61	22 Rusak Berat		
5.	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Unit	12			
6.	Peralatan Personal Komputer Lainnya	Unit	24			
7.	Server	Unit	8			
8.	Router	Unit	9			
9.	Hub	Unit	7			
10.	Modem	Unit	1			
11.	Peralatan Jaringan Lainnya	Unit	17			
C.	Gedung dan Bangunan					
e.	Bangunan Gedung					
1.	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Unit	4	Baik	5	3 kantor eks. 1 kantor BKPSDM
2.	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	Unit	2	Baik	2	Tempat sampah dan Pagar kantor BKPSDM

No.	Jenis Barang	Satuan	Jumlah yang ada	Keterangan Kondisi	Jumlah Kebutuhan	Keterangan
	Gedung Garasi/Pool Permanen	Unit	3	Baik	3	
D.	Jalan, Irigasi dan Jaringan					
	Jalan Lainnya	Unit	1	Baik	1	
	Jaringan Transmisi Tegangan dibawah 1 KVA	Unit	1	Baik	1	
	Jaringan Listrik Liannya	Unit	1	Baik	1	
	Jaringan Telepon diatas tanah Lain-lain	Unit	3	Baik	3	
	Jaringan Telepon Lainnya	Unit	1	Baik	1	
E.	Aset Tetap Lainnya					
	Ilmu Pengetahuan Umum	Buah	156	<i>Rusak</i>		
	Ensylopedia, Kamus, Buku Referensi	Buah	151	<i>Rusak</i>		

(Sumber : Buku Inventaris Gabungan)

*Catatan : Beberapa aset sedang dalam proses penghapusan karena kondisi barang sudah rusak berat

2.1.3 KINERJA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Belitung telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten tahun 2024 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu :

Tabel 2.15 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	$91 \leq 100$	Sangat Baik
2.	$76 \leq 90$	Tinggi
3.	$66 \leq 75$	Sedang
4.	$51 \leq 65$	Rendah
5.	≤ 50	Sangat Rendah

(Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)

Pada dokumen Renstra Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Belitung Tahun 2025-2029 telah ditetapkan sejumlah sasaran pelayanan perangkat daerah BKPSDM di bidang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan beserta target indikator kinerjanya, dimana capaian kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Belitung selama 5 tahun terakhir dari tahun 2020 hingga tahun 2024 dan telah disesuaikan dengan RPJMD Tahun 2018-2023 dan RPD Tahun 2024-2026.

Untuk lebih detilnya tentang kinerja pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Belitung dapat dilihat pada tabel pencapaian kinerja pelayanan dan tabel anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Belitung, sebagai berikut :

TABEL 2.16
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Belitung
Periode 2020 - 2024

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra OPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke- (%)				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Indeks Profesionalitas ASN				77	75	75	76	(71-80)	72,86	58,07	71,56	78,63	79,58	94,62	77,43	95,41	103,46	100
2	Persentase Penempatan ASN sesuai Kompetensi				85	95	95	95	90	81,65	85,76	97,87	101,51	100	96,06	90,27	103,02	106,86	100
3	Persentase ASN yang mendapatkan peningkatan kompetensi minimal 20 JP Per Tahun				60	75	77	80	50	48,91	69,15	43,87	57,53	48,59	81,52	92,20	56,98	71,91	100

Tabel 2.17
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BKPSDM Kabupaten Belitung
Periode 2020 - 2024

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Belanja Pegawai	5.961.906.000	6.496.938.000	5.683.898.812	6.049.276.110	6.285.000.000	5.345.791.203	5.418.220.044	5.422.793.867	5.546.708.143	5.999.741.430	89,66	83,40	95,40	91,69	95,46	6.095.403.784,4	5.546.650.937,4
Belanja Barang & Jasa	3.364.403.520	4.184.226.653	5.155.371.938	5.968.855.745	6.470.830.323	2.654.032.541	2.957.772.018	3.786.431.345	4.964.939.449	5.577.349.641,31	78,89	70,69	73,44	83,18	86,19	5.028.737.635,8	3.988.104.998,86
Belanja Modal	580.252.000	196.878.000	68.154.130	459.440.100	664.335.000	411.399.800	194.525.000	34.798.500	103.200.000	605.560.000	70,90	98,80	51,06	22,46	91,15	393.811.846	1.349.483.300
JUMLAH	9.906.561.520	10.878.042.653	10.907.424.880	12.477.571.955	13.420.165.323	8.411.223.544	8.570.517.062	9.244.023.712	10.614.847.592	12.182.651.071,31	84,91	78,79	84,75	85,07	90,78	11.517.953.266,2	9.804.652.596,26

Berdasarkan tabel-tabel diatas selama kurun waktu 5 (lima) tahun (2020-2024) diketahui bahwa kinerja pelayanan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Belitung dengan capaian indikator utama, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Indeks Profesionalitas ASN

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melakukan tugas jabatan. Berdasarkan Permenpan RB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Indeks Profesionalitas ASN dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN.

Indeks Profesionalitas ASN bertujuan memberikan standar bagi instansi Pusat dan instansi Daerah dalam melaksanakan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN secara sistematis, terukur, dan berkesinambungan.

Ada 4 (empat) kriteria atau dimensi yang digunakan untuk mengukur tingkat profesionalitas ASN yang mencakup :

- a. Dimensi Kualifikasi;** digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai kualifikasi pendidikan formal PNS dari jenjang paling tinggi sampai jenjang paling rendah. Dimensi Kualifikasi diperhitungkan sebesar 25 % dari keseluruhan pengukuran. Indikator yang digunakan adalah riwayat jenjang pendidikan formal terakhir yang dicapai oleh PNS, yang meliputi : Pendidikan S-3), Pendidikan S-2, Pendidikan S-1/D-IV, Pendidikan D-III, Pendidikan SLTA/ D-II/D-I/Sederajat, dan dibawah SLTA.
- b. Dimensi Kompetensi;** digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai riwayat pengembangan kompetensi yang pernah diikuti oleh PNS dan memiliki kesesuaian dalam pelaksanaan tugas jabatan. Dimensi kompetensi diperhitungkan sebesar 40 % dari keseluruhan pengukuran. Indikator yang digunakan yaitu riwayat pengembangan kompetensi yang terdiri dari : Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional, Diklat Teknis, Seminar/Workshop/Magang/Kursus/sejenisnya.
- c. Dimensi Kinerja;** digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai penilaian kinerja yang dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS. Dimensi Kinerja diperhitungkan sebesar 30 % dari keseluruhan

pengukuran. Indikator yang digunakan adalah riwayat hasil penilaian kinerja yang mencakup Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Perilaku Kerja Pegawai (PKP).

- d. Dimensi Disiplin;** digunakan untuk mengukur data/informasi kepegawaian lainnya yang memuat hukuman yang pernah diterima PNS. Dimensi Disiplin diperhitungkan sebesar 5 % dari keseluruhan pengukuran. Indikator yang digunakan yaitu data/informasi mengenai hukuman disiplin yang pernah diterima yang mencakup : Tidak Pernah, Hukuman Disiplin Ringan, Hukuman Disiplin Sedang, dan Hukuman Disiplin Berat.

Tabel 2.18

Kategori Tingkat IP ASN

Nilai	Tingkat Profesionalitas
91 - 100	Sangat Tinggi
81 - 90	Tinggi
71 - 80	Sedang
61 - 70	Rendah
≤ 60	Sangat Rendah

Adapun hasil penghitungan Indeks profesionalitas ASN Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2020 sampai dengan 2024, sebagai berikut :

Tabel 2.19

Rekapitulasi Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2020 - 2024

Unit Kerja : Pemerintah Kabupaten Belitung

Tahun	Nilai IP ASN				Nilai Indeks	Kategori
	Kualifikasi	Kompetensi	Kinerja	Disiplin		
2020	12,18	30,62	25,06	4,99	72,86	Sedang
2021	12,67	16,00	24,41	4,99	58,07	Sangat Rendah
2022	21,04	21,14	24,38	5,00	71,56	Sedang
2023	20,86	28,50	24,26	5,00	78,63	Sedang
2024	20,78	29,64	24,16	5,00	79,58	Sedang

Sumber : Penghitungan Penilaian Mandiri IP ASN (Tahun 2020), Penilaian dari BKN (2021-2024)

Hasil Indeks Profesionalitas (IP) ASN Pemerintah Kabupaten Belitung dari tahun 2020-2024 menunjukkan adanya tren yang perlu diperhatikan, terutama dalam dimensi kualifikasi dan kompetensi yang masih rendah.

Analisa menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara kualifikasi pendidikan yang dimiliki ASN dengan kompetensi yang dibutuhkan untuk menjalankan tugasnya. Hal ini dapat berdampak pada kinerja ASN dan pencapaian tujuan organisasi.

- **Kualifikasi Pendidikan yang Rendah** ; Beberapa ASN mungkin memiliki kualifikasi pendidikan yang tidak sesuai dengan jabatan yang diembannya. Ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti ketidaksesuaian antara jenis pendidikan yang diambil dengan kebutuhan jabatan, atau adanya ASN yang belum menyelesaikan pendidikan yang dibutuhkan untuk jabatan tersebut.
- **Kompetensi yang Rendah** ; ASN mungkin belum memiliki kompetensi yang cukup untuk menjalankan tugasnya secara efektif. Kompetensi ini meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas. Ketidaksesuaian antara kualifikasi pendidikan dan kompetensi bisa terjadi karena kurangnya pelatihan, pengembangan diri, atau kurangnya kesempatan untuk meningkatkan keterampilan.

Kualifikasi dan kompetensi yang rendah dapat berdampak negatif pada kinerja ASN. ASN yang kurang kompeten mungkin kesulitan dalam melaksanakan tugasnya, sehingga berdampak pada efisiensi dan efektivitas kerja. Kualitas layanan publik juga dapat menurun jika ASN tidak memiliki kompetensi yang memadai. Pemerintah perlu melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualifikasi dan kompetensi ASN. Ada beberapa solusi yang dapat dilakukan antara lain :

- Peningkatan kualitas pendidikan ASN melalui pemberian beasiswa, pelatihan, dan pengembangan diri;
- Pemetaan kompetensi ASN secara teratur untuk mengetahui kebutuhan kompetensi yang harus dipenuhi oleh setiap jabatan;
- Penyelenggaraan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan jabatan;
- Evaluasi dan penilaian kinerja ASN secara berkala untuk mengetahui keberhasilan program pengembangan.

2. Persentase Penempatan ASN sesuai Kompetensi

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Belitung memiliki sasaran untuk meningkatkan penataan manajemen ASN. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran ini adalah persentase penempatan ASN sesuai kompetensi. Dengan mengukur persentase ini secara berkala, BKPSDM

dapat mengevaluasi efektivitas program penempatan dan pengembangan kompetensi ASN, serta melakukan perbaikan yang diperlukan. Adapun rumusan indikator dan formulasi perhitungan dapat dilihat pada tabel berikut :

No.	Sasaran	Indikator	Formulasi Perhitungan
1.	Meningkatnya Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	Persentase penempatan ASN sesuai kompetensi	$(\text{Jumlah ASN yang ditempatkan sesuai kompetensi} / \text{Jumlah Total ASN}) \times 100 \%$

Penentuan persentase penempatan ASN sesuai kompetensi melibatkan beberapa unsur yang dinilai untuk menentukan kelayakan seseorang pada posisi tertentu. Unsur-unsur tersebut meliputi :

- 1) **Unsur Organisasi** ; Ini mengacu pada struktur dan sistem organisasi, termasuk bagaimana kompetensi ASN sesuai dengan kebutuhan jabatan dan strategi organisasi.
- 2) **Unsur Sumber Daya Manusia** ; Penilaian terhadap kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan yang dimiliki ASN, serta potensi mereka untuk berkembang.
- 3) **Unsur Metode dan Pelaksanaan Penilaian Kompetensi** ; Ini berkaitan dengan metode yang digunakan untuk menilai kompetensi, seperti uji kompetensi, asesmen, atau metode lainnya, serta bagaimana penilaian tersebut dilaksanakan.

Selain itu, kompetensi ASN juga diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, antara lain :

- 1) **Kompetensi Teknis** ; Ini berkaitan dengan kemampuan khusus dalam bidang pekerjaan tertentu, seperti pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
- 2) **Kompetensi Manajerial** ; Ini meliputi kemampuan dalam memimpin, mengelola orang, dan mengambil keputusan, yang penting bagi ASN yang berada dalam posisi manajerial.
- 3) **Kompetensi Sosial Kultural** ; Ini mencakup kemampuan berinteraksi dengan orang lain, bekerja dalam tim, dan memahami konteks sosial budaya.

Penilaian kompetensi ASN ini dilakukan untuk memastikan bahwa ASN ditempatkan pada posisi yang sesuai dengan kompetensi mereka, sehingga dapat meningkatkan kinerja individu dan organisasi secara keseluruhan.

Capaian Persentase Penempatan ASN sesuai Kompetensi Tahun 2020 sampai dengan 2024, sebagai berikut :

No.	Tahun	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1.	2020	85	81,65	96,06
2.	2021	95	85,76	90,27
3.	2022	95	97,87	100
4.	2023	95	101,51	100
5.	2024	90	100	100

Dari data diatas dapat kita lihat bahwa adanya Peningkatan persentase penempatan Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai kompetensi dari tahun 2020-2024, hal ini menunjukkan adanya upaya yang berkelanjutan dalam menerapkan sistem merit dan meningkatkan kualitas SDM ASN. Fenomena ini dapat dijelaskan melalui beberapa faktor, termasuk fokus pada manajemen talenta, penilaian kompetensi, dan pengelolaan kinerja.

Peningkatan persentase penempatan ASN sesuai kompetensi merupakan indikator positif bahwa pemerintah telah melakukan langkah-langkah yang efektif dalam meningkatkan kualitas SDM ASN dan layanan publik. Upaya ini perlu terus ditingkatkan dan didukung agar dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Adapun Faktor-Faktor Pendorong yang dapat meningkatkan capaian persentase penempatan ASN sesuai kompetensi, antara lain :

1) **Manajemen Talenta**

- Pemetaan kebutuhan dan persediaan talenta berdasarkan keahlian dan profesi;
- Pengelolaan database talenta (talent pool);
- Peningkatan keahlian, kapasitas, dan kinerja ASN;
- Pengembangan karier dan prestasi talenta.

2) **Penilaian Kompetensi**

- Asesmen kompetensi yang dilakukan secara sistematis;
- Instrumen penilaian kompetensi berbasis digital (CACT);
- Penilaian kompetensi yang digunakan untuk menentukan penempatan ASN.

3) **Pengelolaan Kinerja**

- Perencanaan kinerja;
- Pelaksanaan, pemantauan, dan pembinaan kinerja pegawai;
- Penilaian kinerja dan tindak lanjut hasil penilaian kinerja.

3. Persentase ASN yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi Minimal 20 JP per Tahun

Meningkatnya kompetensi ASN dengan indikator Persentase ASN yang Mendapatkan peningkatan Kompetensi Minimal 20 JP per Tahun, adalah upaya untuk meningkatkan dan mengembangkan kompetensi ASN melalui berbagai kegiatan, seperti pendidikan, pelatihan, dan pengembangan karir. Indikator ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mengembangkan sumber daya manusia ASN melalui pengembangan kompetensi. Pengembangan kompetensi ASN adalah upaya untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mereka sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan mereka.

UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) mewajibkan setiap ASN untuk mendapatkan peningkatan kompetensi minimal 20 Jam Pembelajaran (JP) per tahun dan menekankan pentingnya pengembangan kompetensi ASN untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan profesionalisme. Adapun rumusan indikator dan formulasi perhitungan dapat dilihat pada tabel berikut :

No.	Sasaran	Indikator	Formulasi Perhitungan
1.	Meningkatnya Kompetensi ASN	Persentase ASN yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi Minimal 20 JP per Tahun	(Jumlah ASN yang mendapatkan peningkatan kompetensi minimal 20 JP/ Jumlah Total ASN) x 100 %

Persentase ASN yang mendapatkan peningkatan kompetensi ini akan bervariasi tergantung pada berbagai faktor, termasuk jenis ASN (PNS atau PPPK), level jabatan, dan kebutuhan spesifik organisasi. Setiap ASN, baik PNS maupun PPPK, diwajibkan untuk mengikuti program pengembangan kompetensi dengan alokasi minimal 20 JP per tahun. PNS memiliki hak untuk mendapatkan pengembangan kompetensi dengan alokasi minimal 20 JP per tahun, sedangkan untuk PPPK memiliki hak

untuk mendapatkan pengembangan kompetensi dengan alokasi maksimal 24 JP per tahun, sesuai dengan yang diatur dalam PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK.

Capaian Persentase ASN yang mendapatkan peningkatan kompetensi minimal 20 JP per tahun dari Tahun 2020 sampai dengan 2024, sebagai berikut :

No.	Tahun	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1.	2020	60	48,91	81,52
2.	2021	75	69,15	92,20
3.	2022	77	43,87	56,98
4.	2023	80	57,53	71,91
5.	2024	50	48,59	97,18

Dari data diatas dapat kita lihat bahwa adanya kecenderungan penurunan persentase ASN yang mendapatkan peningkatan kompetensi minimal 20 JP per tahun dari tahun 2020-2024. Ada beberapa faktor yang menyebabkan penurunan persentase, antara lain :

- **Implementasi Regulasi** ; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengatur hak ASN untuk mendapatkan pengembangan kompetensi, seperti yang tertuang dalam Pasal 203 Ayat (4) mengatur bahwa setiap PNS wajib mengikuti pengembangan kompetensi dengan alokasi waktu minimal 20 jam pelatihan (JP) setiap tahunnya dan UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara mewajibkan setiap ASN untuk mendapatkan peningkatan kompetensi minimal 20 Jam Pembelajaran (JP) setiap tahunnya. Namun, implementasi regulasi ini di lapangan mungkin belum optimal, sehingga persentase ASN yang benar-benar mendapatkan pelatihan minimal 20 JP belum mencapai target.
- **Kesadaran ASN** ; Tidak semua ASN menyadari pentingnya pengembangan kompetensi untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan publik. Beberapa ASN mungkin masih menganggap pelatihan sebagai kewajiban administratif semata, bukan sebagai investasi untuk masa depan karier mereka. Keterbatasan kesadaran ini bisa berdampak pada partisipasi ASN dalam program pengembangan kompetensi.
- **Keterbatasan Anggaran** ; Pengembangan kompetensi ASN memerlukan anggaran yang cukup. Keterbatasan anggaran di berbagai instansi

pemerintah bisa menjadi faktor penghambat dalam penyediaan program pengembangan yang memadai.

Ada beberapa solusi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan persentase ASN yang memenuhi minimal 20 JP pengembangan kompetensi per tahun, antara lain :

- 1) **Perbaikan Regulasi** ; Melakukan evaluasi dan perbaikan regulasi terkait pengembangan kompetensi ASN, termasuk memastikan adanya mekanisme pengawasan dan sanksi bagi instansi yang tidak memenuhi kewajiban.
- 2) **Peningkatan Kesadaran** ; Melakukan sosialisasi tentang pentingnya pengembangan kompetensi bagi ASN, serta memberikan penghargaan bagi ASN yang aktif dalam program pengembangan serta adanya keterlibatan pimpinan dalam mendorong pengembangan kompetensi ASN.
- 3) **Efektivitas Program** ; Menilai dan memperbaiki kualitas program pengembangan kompetensi, serta memastikan bahwa program tersebut relevan dengan kebutuhan dan tantangan di lapangan.
- 4) **Peningkatan Anggaran** ; Mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk pengembangan kompetensi ASN, sehingga program-program pengembangan dapat dilaksanakan secara lebih efektif.

2.1.4 INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) BKPSDM KAB. BELITUNG

Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan ukuran yang paling penting dan strategis dalam mencerminkan keberhasilan daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan sesuai kewenangannya. Dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), capaian IKK menjadi tolok ukur utama dalam menilai efektivitas dan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Indikator Kinerja Kunci (IKK) BKPSDM Kabupaten Belitung sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah :

Tabel 2.20 Rumusan Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan Formulasi Perhitungan

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Formulasi Perhitungan
1	2	3	4
1.	Kepegawaian	Rasio pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/ Dasar (%) **(PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	$\frac{\text{Jumlah pegawai menurut pendidikan PT keatas (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)}}{\text{Seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)}}$
		Rasio pegawai fungsional (%) **(PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	$\frac{\text{Jumlah pegawai PNS fungsional (Diluar guru dan tenaga kesehatan)}}{\text{Seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)}}$
2.	Pendidikan dan Pelatihan	Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (%) **(PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	$\frac{\text{Jumlah pegawai fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi (Diluar guru dan tenaga kesehatan)}}{\text{Seluruh jumlah pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)}}$

Perbandingan dari tahun ke tahun dari pengukuran realisasi dan tingkat capaian kinerja yang di ukur dari Indikator Kinerja Kunci (IKK) ditunjukkan pada Tabel 2.9 tentang perbandingan capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tahun 2020-2024.

No.	IKK	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%)	n/a	79,78	88,60	79,83	82,69
2.	Rasio pegawai fungsional (%)	n/a	24,84	25,18	28,80	28,87
3.	Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (%)	n/a	100	30,46	32,85	59,00

Berdasarkan capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan kepegawaian tahun 2020–2024, dapat disimpulkan bahwa :

- a. Rasio pegawai berpendidikan tinggi menunjukkan tren yang fluktuatif. Hal ini disebabkan beberapa faktor antara lain :
 - **Rekrutmen ASN Baru** : Perekrutan ASN baru dengan latar belakang pendidikan yang berbeda dapat memengaruhi rasio ini. Jika lebih banyak ASN baru dengan pendidikan tinggi yang masuk, rasio akan meningkat.
 - **Pensiun dan Mutasi**: Pensiunnya ASN dengan pendidikan tinggi atau mutasi keluar dari instansi dapat menurunkan rasio, begitu juga sebaliknya.
 - **Peningkatan Kualitas SDM**: Program pendidikan lanjutan atau pelatihan bagi ASN dapat meningkatkan jumlah ASN yang memiliki latar belakang pendidikan tinggi, sehingga dapat memengaruhi rasio secara positif.
 - **Kebijakan Kepegawaian**: Adanya kebijakan rekrutmen yang mengutamakan pendidikan tinggi atau program-program pengembangan SDM dapat menyebabkan perubahan rasio.
- b. Rasio pegawai fungsional cenderung naik dan stabil karena adanya kebijakan pemerintah untuk mengalihkan jabatan struktural ke jabatan fungsional, serta sistem penilaian kinerja berbasis angka kredit yang mendorong kenaikan pangkat dan jenjang jabatan bagi pegawai yang berkinerja baik. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan keahlian dan kompetensi ASN, sehingga banyak ASN yang beralih ke jabatan fungsional untuk mengembangkan bidang minatnya.
- c. Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2021, namun menurun kembali pada 2022 dan telur mengalami kenaikan dari Tahun 2023-2024. Kondisi ini menandakan masih perlunya konsistensi dalam pembinaan dan fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi jabatan fungsional.

Secara umum, kinerja urusan kepegawaian menunjukkan adanya perbaikan terutama dari sisi peningkatan kualifikasi pendidikan ASN, namun masih menghadapi tantangan dalam optimalisasi jabatan fungsional dan pemenuhan sertifikasi kompetensi.

2.1.5 KELOMPOK SASARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Kelompok sasaran pelayanan perangkat daerah pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) adalah seluruh aparatur sipil negara (ASN) dan calon ASN (CASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung. BKPSDM memiliki tugas pokok dan fungsi untuk membantu kepala daerah dalam hal administrasi kepegawaian dan pengembangan SDM aparatur daerah.

2.2. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Tabel 2.20 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
Aparatur Sipil Negara	Belum optimalnya pelaksanaan Manajemen Talenta dan masih kurangnya peningkatan kualitas kinerja	1. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pemerintah	1. Perubahan iklim dan dampaknya	1. Reformasi birokrasi nasional	1. Kesiapan menghadapi digitalisasi layanan publik daerah	Manajemen karier dan manajemen talenta SDM untuk mewujudkan ASN yang profesional dan berintegritas;
	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi belum merata.	2. Perbaikan sistem birokrasi pemerintah	2. Globalisasi	2. Digitalisasi pemerintahan	2. Isu sosial, budaya, dan geografis lokal	kesenjangan kompetensi pegawai;
	adanya Kekurangan tenaga kerja terampil dalam bidang tertentu seperti, teknis, administratif, dan manajerial	3. Peningkatan kapasitas SDM Aparatur	3. Transformasi digital	3. Transformasi digital	3. Kebutuhan talenta ASN berkinerja tinggi	Penataan pegawai melalui pengadaan, mutasi, rotasi dan promosi;
	Belum optimalnya penggunaan sistem informasi dalam layanan kepegawaian		4. Tuntutan good governance dan akuntabilitas teknologi	4. Tuntutan good governance dan akuntabilitas teknologi		pelayanan kepegawaian berbasis teknologi

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Belitung

Permasalahan pelayanan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Belitung, sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pelaksanaan Manajemen Talenta dan masih kurangnya peningkatan kualitas kinerja
2. Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi belum merata.
3. Adanya Kekurangan tenaga kerja terampil dalam bidang tertentu seperti, teknis, administratif, dan manajerial
4. Belum optimalnya penggunaan sistem informasi dalam layanan kepegawaian

2.2.2 Isu Strategis

Rumusan Isu Strategis berdasarkan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Belitung adalah sebagai berikut :

1. Manajemen karier dan manajemen talenta SDM untuk mewujudkan ASN yang profesional dan berintegritas;
2. Kesenjangan kompetensi pegawai;
3. Penataan pegawai melalui pengadaan, mutasi, rotasi dan promosi;
4. Pelayanan kepegawaian berbasis teknologi.

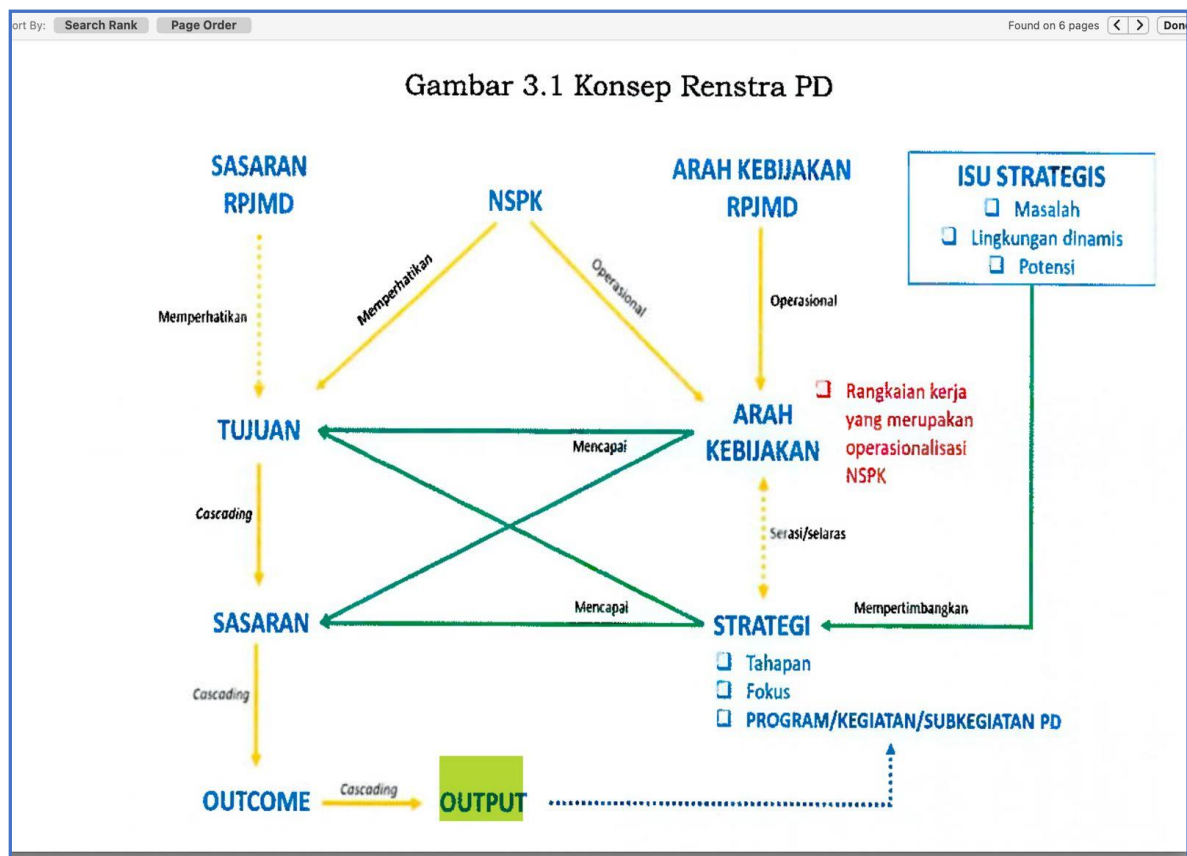
BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA BKPSDM KABUPATEN BELITUNG

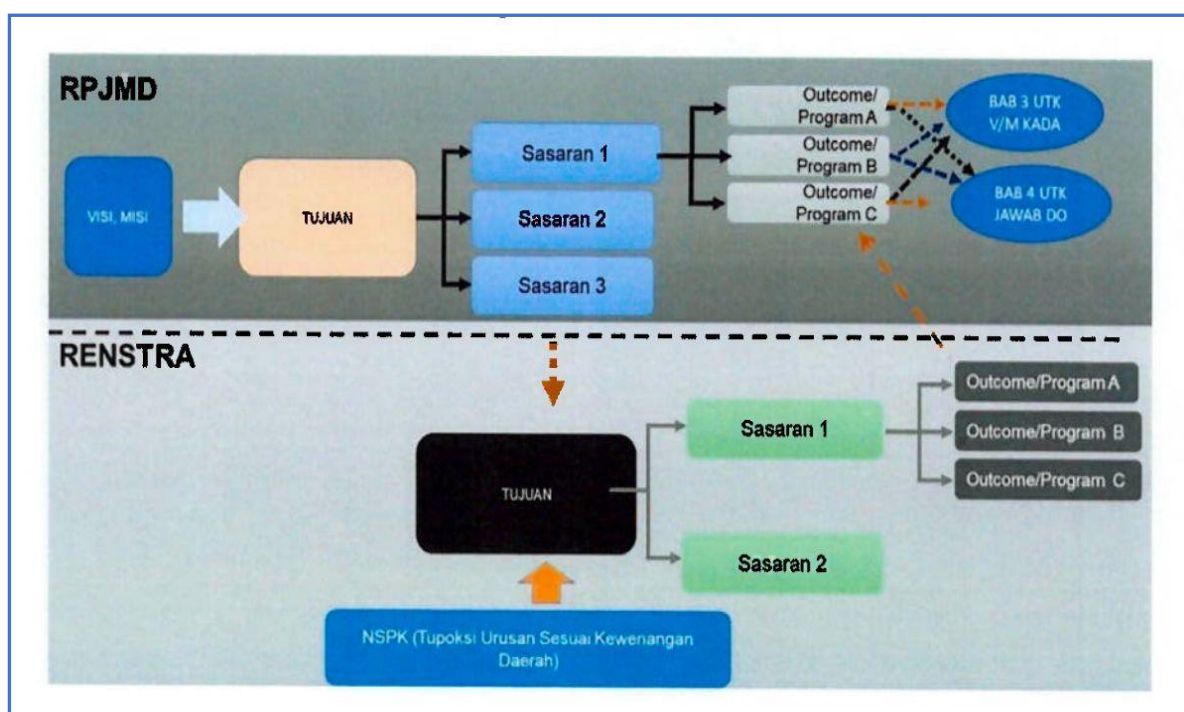
Konsep Renstra PD berdasarkan Inmendagri No. 2 Tahun 2025 adalah penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) periode 2025-2029 yang mengacu pada Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) dari Pemerintah Pusat untuk memastikan keselarasan dengan RPJMD, RPJPN, dan visi misi kepala daerah terpilih. Fungsi NSPK di sini adalah untuk menjadi panduan normatif dan teknis dalam merumuskan tujuan, sasaran, program, serta mengendalikan dan mengevaluasi kinerja perangkat daerah agar sesuai standar dan efektif dalam melayani masyarakat.

Gambar 3.1 Konsep Renstra Perangkat Daerah



Kerangka keterkaitan RPJMD dan tujuan Renstra Perangkat Daerah adalah **hierarkis**, di mana RPJMD menjadi pedoman utama dan Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran teknis yang lebih rinci untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD. Renstra PD menguraikan program dan kegiatan spesifik yang akan dilakukan oleh setiap perangkat daerah untuk mendukung visi, misi, dan strategi pembangunan daerah, sekaligus memastikan keselarasan antara kebijakan di tingkat daerah dengan pelaksanaan di lapangan.

Gambar 3.2 Kerangka keterkaitan RPJMD dan tujuan Renstra Perangkat Daerah



3.1.1 Tujuan Renstra BKPSDM Kabupaten Belitung Tahun 2025 - 2029

Tujuan rencana strategis yaitu hal-hal yang ingin dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan, yang selaras dengan visi dan misi instansi/organisasi. Tujuan bersifat strategis dan jangka menengah, menjadi dasar untuk menentukan arah kebijakan, program, dan sasaran organisasi. Sasaran rencana strategis yaitu hasil yang lebih spesifik dan terukur yang ingin dicapai dalam periode perencanaan, sebagai penjabaran dari tujuan. Tujuan BKPSDM Kabupaten Belitung, yaitu **“Meningkatnya profesionalitas ASN serta pengetahuan, keahlian, dan keterampilan ASN”**.

3.1.2 Sasaran Renstra BKPSDM Kabupaten Belitung Tahun 2025 - 2029

Sasaran menunjukkan perubahan yang ingin dicapai baik dalam kualitas, maupun kuantitas. Sasaran menjadi dasar penyusunan indikator kinerja, program, kegiatan, dan anggaran. Sasaran 1 BKPSDM Kabupaten Belitung **“Meningkatnya Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur”** dan Sasaran 2 BKPSDM Kabupaten Belitung **“Meningkatnya Kompetensi ASN”**. Tujuan dan sasaran serta indikator BKPSDM Kabupaten Belitung ditunjukkan pada Tabel 3.1.

Tabel 3.3 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra BKPSDM Kabupaten Belitung

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	TARGET TAHUN						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Peraturan Kepala BKN Nomor 12 Tahun 2022 tentang Indeks dan Penilaian Implementasi NSPK Manajemen ASN Sasaran RPJMD yang relevan : Terwujudnya Profesionalitas ASN	Meningkatnya profesionalitas ASN serta pengetahuan, keahlian, dan keterampilan ASN		Indeks Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Manajemen ASN	88,30	88,35	88,40	88,45	88,50	88,55	Sumber Data : Laporan Hasil Implementasi NSPK Manajemen ASN dari BKN Rumus : Formula untuk menghitung Indeks NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) Manajemen ASN adalah $(N/X) \times 100\%$, di mana N adalah skor yang dicapai dan X adalah skor maksimal yang mungkin dicapai.

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	TARGET TAHUN						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Permenpan RB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah; dan Permenpan RB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi		Meningkatnya Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	Persentase penempatan ASN sesuai kompetensi	88	89	90	91	92	93	(Jumlah ASN yang ditempatkan sesuai kompetensi / Jumlah total ASN) x 100%
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil		Meningkatnya Kompetensi ASN	Persentase ASN yang mendapatkan peningkatan kompetensi minimal 20 JP per Tahun	51	52	53	54	55	56	(Jumlah ASN yang mendapatkan peningkatan kompetensi minimal 20 JP per tahun / Jumlah total ASN) x 100%

3.2. STRATEGI RENSTRA BKPSDM KABUPATEN BELITUNG

Strategi Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Belitung Tahun 2025-2029

Tabel 3.2.1 Penahapan Renstra BKPSDM Kabupaten Belitung

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1) Perencanaan	(2) Penguatan	(3)Percepatan	(4)Pemantapan	(5)Perwujudan
Mengidentifikasi kebutuhan talenta yang spesifik dalam bidang, jabatan, dan kompetensi tertentu	Mempersiapkan dan melaksanakan asesmen center	Persiapan akreditasi asesmen center	Penguatan implementasi sistem manajemen talenta	Terwujudnya ASN yang profesional dan berintegritas

3.3. ARAH KEBIJAKAN RENSTRA BKPSDM KABUPATEN BELITUNG

Arah kebijakan Renstra BKPSDM adalah landasan utama dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program BKPSDM selama kurun waktu 5 tahun. Renstra BKPSDM berfungsi sebagai panduan untuk mencapai visi dan misi, serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kabupaten Belitung Tahun 2025-2029. Arah kebijakan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah dan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah.

Tabel 3.3.1 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra BKPSDM

Kabupaten Belitung

No.	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	<p>NSPK Manajemen ASN</p> <p>UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara</p> <p>Peraturan Kepala BKN Nomor 12 Tahun 2022 tentang Indeks dan Penilaian Implementasi NSPK Manajemen ASN</p> <p>Peraturan Kepala BKN Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN</p> <p>Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil</p>	<p>Mengintegrasikan pengelolaan manajemen ASN dengan teknologi informasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pemanfaatan teknologi digital untuk menciptakan sistem manajemen ASN yang efisien, efektif dan akurat; ➤ Peningkatan Kompetensi SDM Aparatur; ➤ Digitalisasi Proses Manajemen ASN ➤ Menjamin Penerapan Sistem Merit ➤ Pembangunan Manajemen Talenta 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Penggunaan SIASN secara maksimal untuk mengintegrasikan data ASN secara nasional ➤ Menyelenggarakan pelatihan dan pengembangan kompetensi yang relevan dengan kebutuhan organisasi dan tugas-tugas aparatur. ➤ Berbagai proses manajemen ASN akan didigitalisasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas, seperti: perencanaan kebutuhan ASN, pengadaan ASN, pengelolaan kinerja dan pengembangan kompetensi ASN. ➤ BKPSDM memastikan bahwa seleksi, promosi, dan pengembangan ASN dilakukan berdasarkan sistem merit, yaitu berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, tanpa adanya diskriminasi. ➤ BKPSDM membangun sistem manajemen talenta yang meliputi akuisisi, pengembangan, retensi, dan penempatan talenta yang berpotensi untuk jabatan strategis. ➤ Sistem merit dan manajemen talenta bertujuan untuk menghasilkan ASN yang profesional, berintegritas, dan kompeten

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah serta mewujudkan tata kelola kepegawaian yang profesional, akuntabel, dan adaptif, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Belitung menyusun perencanaan program, kegiatan, dan subkegiatan secara sistematis dan berbasis kinerja. Penyusunan ini dilakukan dengan mengacu pada Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) urusan pemerintahan bidang kepegawaian dan Pendidikan dan Pelatihan, serta diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Belitung.

Merumuskan program dan kegiatan secara efektif sangat penting dalam perencanaan pembangunan, baik di instansi pemerintah maupun organisasi lainnya. Berikut ini teknik merumuskan program dan kegiatan yang dapat diterapkan secara sistematis :

1. Mengacu pada visi, misi, dan tujuan;
2. Berdasarkan analisis situasi dan permasalahan;
3. Menyusun tujuan dan sasaran PD;
4. Menyusun program/kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, memetakan outcome;
5. Menjabarkan kegiatan, indikator subkegiatan, memetakan output.

Teknik merumuskan program/kegiatan/subkegiatan Renstra PD ditunjukkan pada Tabel 4.1

**Tabel 4.2 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra BKPSDM Kabupaten Belitung
Tahun 2025 - 2029**

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Kinerja Kegiatan	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<p>Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara</p> <p>Sasaran RPJMD yang relevan : Terwujudnya Profesionalitas ASN</p> <p>Peraturan Kepala BKN Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN</p> <p>Peraturan Kepala BKN Nomor 12 Tahun 2022 tentang Indeks dan Penilaian Implementasi NSPK Manajemen ASN</p>	<p>Meningkatnya profesionalitas ASN serta pengetahuan, keahlian, dan keterampilan ASN</p>					<p>Indeks NSPK Manajemen ASN</p>		<p>Dirilis oleh BKN NSPK: Perka BKN Nomor 12 Tahun 2022</p> <p>18 elemen NSPK Manajemen ASN:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan dan Penetapan kebutuhan ASN 2. Pengadaan ASN 3. Pengangkatan ASN 4. pangkat; 5. mutasi; 6. jabatan; 7. pengembangan karier ASN; 8. pola karier; 9. penggajian, tunjangan, dan fasilitas; 10. penghargaan; 11. jaminan pensiun dan jaminan hari tua; 12. perlindungan; 13. penilaian kinerja; 14. cuti; 15. kode etik; 16. disiplin; 17. pemberhentian; dan 18. pensiun. <p>rate nilai 85,01 - 100 : unggul 70,01 - 85,00 : baik 55,01 - 70,00 : cukup 40,01 - 55,00 : kurang</p>

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Kinerja Kegiatan	Output	Indikator	Progam/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1. Meningkatnya penataan sistem manajemen SDM aparatur				Persentase penempatan ASN sesuai kompetensi		(jumlah ASN yang ditempatkan sesuai dengan kompetensi / jumlah total ASN) x 100
			Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah				Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
						1. Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai ketentuan		DO sesuai ketentuan: a. Perencanaan pembangunan sesuai dengan tahapan yang diamanatkan aturan perundangan (20%) b. Perencanaan pembangunan selesai tepat waktu sesuai yang diamanatkan aturan perundangan; (bobot 30%) (penetapan dokrenda) c. Dokumen perencanaan sesuai dengan sistematika yang diamanatkan aturan perundangan (bobot 20%) d. Keselarasan kegiatan pada Renstra dan Renja perubahan pada tiap tahunnya (termasuk tahapan pengendalian dan evaluasi perencanaan); (bobot 30%) Rumus : a+b+c+d
						2. Persentase Dokumen Keuangan dan Aset sesuai ketentuan		Dokumen keuangan dan aset selesai tepat waktu sesuai yang diamanatkan aturan perundangan. (Lap keu tahunan, lap keu semester, lap. aset)

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Kinerja Kegiatan	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						3. Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah		Rata-rata IP ASN Pegawai PD (lihat di MyASN)
						4. Nilai Survei Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah		Survei kepuasan pelayanan administrasi perkantoran. Survei ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran yang diselenggarakan oleh Sekretariat 85,01 - 100 : unggul 70,01 - 85,00 : baik 55,01 - 70,00 : cukup 40,01 - 55,00 : kurang
						5. Nilai Survei Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Perangkat Daerah		Survei kepuasan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur. Survei ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur yang diselenggarakan oleh Sekretariat 85,01 - 100 : unggul 70,01 - 85,00 : baik 55,01 - 70,00 : cukup 40,01 - 55,00 : kurang
				Tersusunnya Dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah sesuai ketentuan	Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Kinerja Kegiatan	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							<i>Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	
							<i>Subkegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	
				Tersusunnya Dokumen keuangan dan aset perangkat daerah sesuai ketentuan	Dokumen Keuangan dan Aset Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Keuangan dan Aset Perangkat Daerah	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
							<i>Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	
							<i>Subkegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran</i>	
				Terpenuhinya administrasi kepegawaian perangkat daerah sesuai ketentuan	Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Penerima Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Kinerja Kegiatan	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							<i>Subkegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai</i>	
							<i>Subkegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</i>	
							<i>Subkegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</i>	
				Tersedianya keperluan administrasi umum perangkat daerah	Jenis Penyediaan Keperluan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Penyediaan Keperluan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	
							<i>Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Kinerja Kegiatan	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							<i>Subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	
							<i>Subkegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</i>	
							<i>Subkegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	
							<i>Subkegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	
							<i>Subkegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan</i>	
							<i>Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Kinerja Kegiatan	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Tersedianya Barang milik daerah	Barang Milik Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
							<i>Subkegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	
							<i>Subkegiatan Pengadaan Mebel</i>	
							<i>Subkegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	
				Tersedianya Jasa Penunjang Urusan pemerintahan Daerah	Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
							<i>Subkegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	
							<i>Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Kinerja Kegiatan	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							<i>Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	
				Tersedianya Barang milik daerah dalam kondisi baik	Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	Jumlah Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
							<i>Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	
							<i>Subkegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	
							<i>Subkegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Kinerja Kegiatan	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Meningkatnya kualitas layanan kepegawaian			1. Persentase pengisian ASN berdasarkan formasi kebutuhan	Kepegawaian Daerah	(Jumlah formasi ASN yang terisi / Jumlah formasi yang ditetapkan oleh Menpan) x 100%
				Terkelolanya Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Terlaksananya Pengelolaan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah Dokumen Pengelolaan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	
							<i>Subkegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN</i>	
							<i>Subkegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian</i>	
							<i>Subkegiatan Pengelolaan Data Kepegawaian</i>	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Kinerja Kegiatan	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Terkelolanya Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Terfasilitasinya Lembaga Profesi ASN	Laporan Penyelenggaraan Lembaga Profesi ASN	Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	
							<i>Subkegiatan Fasilitasi Lembaga Profesi ASN</i>	
			Meningkatnya kualitas layanan kepegawaian			2. Persentase penempatan pegawai sesuai kualifikasi	Program Kepegawaian Daerah	(Jumlah pejabat struktural yang sesuai dengan kualifikasi jabatan struktural / Jumlah total pejabat struktural) x 100 %
				Tersedianya Dokumen Mutasi dan Promosi ASN	Dokumen Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Mutasi dan Promosi ASN	Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN	
							<i>Subkegiatan Pengelolaan Mutasi ASN</i>	
							<i>Subkegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN</i>	
							<i>Subkegiatan Pengelolaan Promosi ASN</i>	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Kinerja Kegiatan	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Meningkatnya kualitas layanan kepegawaian			3. Persentase ASN dengan nilai prestasi kinerja Baik	Program Kepegawaian Daerah	(Jumlah ASN dengan nilai SKP baik tahun n-1 / Jumlah total ASN n-1) x 100 %
				Terlaksananya Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Laporan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Laporan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	
							<i>Subkegiatan Pembinaan Disiplin ASN</i>	
			Meningkatnya Pengembangan Kompetensi ASN			Persentase ASN yang mendapatkan Pengembangan Kompetensi	Program Kepegawaian Daerah	(Jumlah PNS yang melaksanakan pengembangan kompetensi / Jumlah PNS yang dianggarkan untuk mengikuti pengembangan kompetensi) x 100%
				Terlaksananya pengembangan kompetensi bagi ASN	ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi	Jumlah ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi	Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Kinerja Kegiatan	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							<i>Subkegiatan Pengelolaan Asesmen Center</i>	
							<i>Subkegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN</i>	
		2. Meningkatnya Kompetensi ASN				Persentase ASN yang mendapatkan peningkatan kompetensi minimal 20 JP per Tahun		(jumlah ASN yang mendapatkan peningkatan kompetensi minimal 20 JP pertahun / jumlah total ASN) x 100
			Meningkatnya Layanan Pengembangan Kompetensi Teknis, Manajerial dan Fungsional			Persentase Sumber Daya Aparatur Sipil Negara yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis, Manajerial dan Fungsional	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	(Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis, Manajerial dan Fungsional / Jumlah ASN) x 100 %
				Terlaksananya pengembangan kompetensi teknis bagi ASN	ASN yang mendapatkan Pengembangan kompetensi Teknis	Jumlah ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi Teknis	Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Kinerja Kegiatan	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							<i>Subkegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan Bagi Jabatan Administasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintah Umum</i>	
				Terlaksananya pengembangan kompetensi Manajerial dan Fungsional bagi ASN	ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	
							<i>Subkegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pemerintah Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan</i>	

**Tabel 4.3 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan
Tahun 2025 - 2029**

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN TARGET	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
BIDANG URUSAN : KEPEGAWAIAN					8.009.686.782,04		15.673.650.000,00		14.467.930.000,00		14.050.750.000,00		14.358.750.000,00	
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota														
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah					7.106.251.074,04		9.987.650.000,00		8.575.750.000,00		8.230.750.000,00		8.380.750.000,00	BKPSDM
	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai Ketentuan	%	N/A	100		100		100		100		100		
	Persentase Dokumen Keuangan dan Aset sesuai ketentuan	%	N/A	100		100		100		100		100		
	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	Nilai	70	80,15		80,93		81,20		81,87		82,56		
	Nilai Survei Kepuasan Pegawai Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	Nilai	N/A	80 (Baik)		81 (Baik)		82 (Baik)		83 (Baik)		84 (Baik)		
	Nilai Survei Kepuasan Pegawai Terhadap Pelayanan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Perangkat Daerah	Nilai	N/A	80 (Baik)		81 (Baik)		82 (Baik)		83 (Baik)		84 (Baik)		
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	6	0	0	5	1.250.000	5	1.250.000	5	1.250.000	5	1.250.000	BKPSDM
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	0	0	2	500.000	2	500.000	2	500.000	2	500.000	BKPSDM
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	3	0	0	3	750.000	3	750.000	3	750.000	3	750.000	
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah														
Dokumen Keuangan dan Aset Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Keuangan dan Aset Perangkat Daerah	Dokumen	3	1	6.379.608.742,04	3	6.350.500.000	3	6.400.500.000	3	6.450.500.000	3	6.450.500.000	BKPSDM
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	38	41	6.379.608.742,04	45	6.350.000.000	45	6.400.000.000	45	6.450.000.000	45	6.450.000.000	
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	2	0	0	2	500.000	2	500.000	2	500.000	2	500.000	BKPSDM
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah														
Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Penerima Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Orang	38	41	80.000.000	45	231.000.000	45	227.000.000	45	231.000.000	45	227.000.000	BKPSDM

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN TARGET	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	38	41	6.379.608.742,04	45	6.350.000.000	45	6.400.000.000	45	6.450.000.000	45	6.450.000.000	
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	2	0	0	2	500.000	2	500.000	2	500.000	2	500.000	BKPSDM
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah														
Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Penerima Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Orang	38	41	80.000.000	45	231.000.000	45	227.000.000	45	231.000.000	45	227.000.000	BKPSDM
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	0	0	0	1	4.000.000	0	0	1	4.000.000	0	0	BKPSDM
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	1	0	0	1	27.000.000	1	27.000.000	1	27.000.000	1	27.000.000	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	6	5	80.000.000	15	200.000.000	15	200.000.000	15	200.000.000	15	200.000.000	BKPSDM
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah														
Jenis Penyediaan Keperluan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Penyediaan Keperluan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jenis	3	3	213.529.032	3	431.000.000	3	462.000.000	3	463.000.000	3	483.000.000	BKPSDM
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	8.059.155	1	18.000.000	1	19.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	2	2	38.209.530	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	1	4.996.887	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik yang Disediakan	Paket	2	2	55.500.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	BKPSDM
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	5.563.460	1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	1	1.200.000	1	8.000.000	1	8.000.000	1	8.000.000	1	8.000.000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	100.000.000	12	150.000.000	12	180.000.000	12	180.000.000	12	200.000.000	
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah														
Barang Milik Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	Unit	34	0	0	226	1.765.900.000	19	577.000.000	18	177.000.000	18	280.000.000	BKPSDM

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN TARGET	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Jabatan yang Disediakan	Unit	5	0	0	0	0	1	400.000.000	0	0	0	0	
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	0	0	0	150	404.000.000	8	27.000.000	8	27.000.000	8	30.000.000	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	29	0	0	76	1.361.900.000	10	150.000.000	10	150.000.000	10	250.000.000	
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah														
Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan	36	12	339.154.800	12	433.000.000	12	433.000.000	12	433.000.000	12	444.000.000	BKPSDM
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	4	2.992.000	4	7.000.000	4	7.000.000	4	7.000.000	4	8.000.000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	4	203.450.000	4	270.000.000	4	270.000.000	4	270.000.000	4	280.000.000	BKPSDM
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	4	132.712.800	4	156.000.000	4	156.000.000	4	156.000.000	4	156.000.000	
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah														
Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	Jumlah Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	Unit	193	49	93.958.500	196	775.000.000	196	475.000.000	196	475.000.000	206	495.000.000	BKPSDM
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara	Unit	17	22	30.078.000	20	125.000.000	20	125.000.000	20	125.000.000	20	125.000.000	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	175	26	25.030.500	175	150.000.000	175	150.000.000	175	150.000.000	185	170.000.000	BKPSDM
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	38.850.000	1	500.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	
Program Kepegawaian Daerah														
Meningkatnya Kualitas Layanan Kepegawaian					517.935.708		2.786.000.000		2.853.000.000		2.920.000.000		2.978.000.000	BKPSDM
	Persentase pengisian ASN berdasarkan formasi kebutuhan	%	N/A	84		86		88		90		91		
	Persentase penempatan pegawai sesuai kualifikasi (PK)	%	N/A	82		83		84		85		85		
	Persentase ASN dengan nilai prestasi kinerja Baik	%	N/A	82		83		84		85		85		

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN TARGET	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN														
Terlaksananya Pengelolaan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah Dokumen Pengelolaan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Dokumen	3	1	234.032.708	3	890.000.000	3	940.000.000	3	990.000.000	3	990.000.000	BKPSDM
Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Dokumen	1	1	234.032.708	1	550.000.000	1	600.000.000	1	650.000.000	1	650.000.000	BKPSDM
Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	1	0	0	1	90.000.000	1	90.000.000	1	90.000.000	1	90.000.000	BKPSDM
Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	Dokumen	1	0	0	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	BKPSDM
Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN														
Terfasilitasinya Lembaga Profesi ASN	Laporan Penyelenggaraan Lembaga Profesi ASN	Laporan	N/A	1	51.201.000	1	1.200.000.000	1	1.200.000.000	1	1.200.000.000	1	1.200.000.000	BKPSDM
Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	Lembaga	1	1	51.201.000	1	1.200.000.000	1	1.200.000.000	1	1.200.000.000	1	1.200.000.000	BKPSDM
Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN														
Dokumen Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Mutasi dan Promosi ASN	Dokumen	3	5	232.702.000	6	582.000.000	6	592.000.000	6	602.000.000	6	655.000.000	BKPSDM
Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah	Dokumen	1	4	40.700.000	4	77.000.000	4	77.000.000	4	77.000.000	4	80.000.000	BKPSDM
Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Dokumen	0	0	0	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	BKPSDM
Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Dokumen	2	1	192.002.000	1	430.000.000	1	440.000.000	1	450.000.000	1	500.000.000	BKPSDM
Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur														
Laporan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Laporan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Laporan	1	0	0	1	114.000.000	1	121.000.000	1	128.000.000	1	133.000.000	BKPSDM
Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	Orang	11	0	0	275	114.000.000	275	121.000.000	275	128.000.000	300	133.000.000	BKPSDM

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	SATUAN TARGET	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	TARGET	PAGU (Rp)	
Program Kepegawaian Daerah														
Meningkatnya Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase ASN yang mendapatkan Pengembangan Kompetensi	%	-	90	385.500.000	91	2.900.000.000	92	3.039.180.000	93	2.900.000.000	94	3.000.000.000	BKPSDM
Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN														
ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi	Jumlah ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi	Orang	22	5	385.500.000	80	2.900.000.000	80	3.039.180.000	80	2.900.000.000	80	3.000.000.000	BKPSDM
Pengelolaan Asesmen Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	Dokumen	0	0	0	1	900.000.000	1	1.039.180.000	1	900.000.000	1	1.000.000.000	BKPSDM
Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	Orang	22	5	385.500.000	20	2.000.000.000	20	2.000.000.000	20	2.000.000.000	20	2.000.000.000	BKPSDM
BIDANG URUSAN : PENDIDIKAN DAN PELATIHAN														
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia														
Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi Teknis, Manajerial dan Fungsional	Persentase Sumber Daya Aparatur Sipil Negara yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis, Manajerial dan Fungsional	%	49	52	183.477.000	53	4.875.000.000	54	4.975.000.000	55	5.075.000.000	60	5.100.000.000	BKPSDM
Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis														
ASN yang mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah ASN yang mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis	Orang	184	8	84.693.000	160	675.000.000	160	675.000.000	160	675.000.000	175	700.000.000	BKPSDM
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan Bagi Jabatan Administasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintah Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	Orang	184	8	84.693.000	160	675.000.000	160	675.000.000	160	675.000.000	175	700.000.000	BKPSDM
Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional														
ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Orang	158	3	98.784.000	145	4.200.000.000	150	4.300.000.000	155	4.400.000.000	155	4.400.000.000	BKPSDM
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pemerintah Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	Laporan	1	1	98.784.000	1	4.200.000.000	1	4.300.000.000	1	4.400.000.000	1	4.400.000.000	BKPSDM
					8.193.163.782,04		20.548.650.000,00		19.442.930.000,00		19.125.750.000,00		19.458.750.000,00	

Tabel 4.4 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No.	Program Prioritas	Outcome Program Prioritas	Program Kepmendagri Nomor 900.0.2850 Tahun 2025	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Program MENARA INTEGRITAS Belitung	Meningkatnya Kualitas Layanan Kepegawaian	Program Kepegawaian Daerah	Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	
				<i>Subkegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN</i>	
				Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN	
				<i>Subkegiatan Pengelolaan Mutasi ASN</i>	
				<i>Subkegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN</i>	
				<i>Subkegiatan Pengelolaan Promosi ASN</i>	
				Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	
				<i>Subkegiatan Pembinaan Disiplin ASN</i>	

No.	Program Prioritas	Outcome Program Prioritas	Program Kepmendagri Nomor 900.0.2850 Tahun 2025	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Meningkatnya Pengembangan kompetensi ASN		Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN	
				<i>Subkegiatan Pengelolaan Asesmen Center</i>	
				<i>Subkegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN</i>	
		Meningkatnya Layanan Pengembangan Kompetensi Teknis, Manajerial dan Fungsional	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis	
				<i>Subkegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan Bagi Jabatan Administasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintah Umum</i>	
				Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	

No.	Program Prioritas	Outcome Program Prioritas	Program Kepmendagri Nomor 900.0.2850 Tahun 2025	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				<i>Subkegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pemerintah Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan</i>	

**Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama BKPSDM Kabupaten Belitung
Tahun 2025 - 2030**

No.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Indeks Implementasi Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Manajemen ASN	Nilai	88,30	88,35	88,40	88,45	88,50	88,55	
2.	Persentase Penempatan ASN sesuai Kompetensi	Persen	88	89	90	91	92	93	
3.	Persentase ASN yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi Minimal 20 JP per Tahun	Persen	51	52	53	54	55	56	

**Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci BKPSDM Kabupaten Belitung
Tahun 2025 – 2030**

No.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen (%)	82,75	82,80	82,85	82,90	82,95	83	(Jumlah pegawai menurut pendidikan perguruan tinggi keatas/jumlah seluruh pegawai) x 100%
2.	Rasio Pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen (%)	28,95	29	29,05	29,10	29,15	29,20	{Jumlah pegawai PNS fungsional (diluar guru dan tenaga kesehatan)/seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)} x 100%
3.	Rasio Pegawai Fungsional Bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen (%)	59,05	59,10	59,15	59,20	59,25	59,30	{Jumlah pegawai Fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi (diluar guru dan tenaga kesehatan)/Seluruh jumlah pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)} x 100%

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Belitung tahun 2025-2029 disusun berdasarkan tahapan dan tata cara penyusunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Belitung menjadi pedoman yang harus dilaksanakan oleh Perangkat Daerah guna mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Belitung Tahun 2025 – 2029 memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, anggaran, Program/Kegiatan, serta indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Belitung Tahun 2025 – 2029 juga menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.

Melalui Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Belitung Tahun 2025 – 2029 ini diharapkan tujuan dan sasaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Belitung dapat tercapai, dan dapat memberikan kontribusi yang nyata bagi RPJMD Kabupaten Belitung Tahun 2025 – 2029 dalam mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Belitung pada khususnya, serta kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Penyusunan Renstra mempertimbangkan kesetaraan bagi masyarakat untuk mengakses layanan, berpartisipasi dalam kegiatan dan pembangunan, hingga menikmati manfaatnya.

Demikian Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Belitung Tahun 2025 – 2029 ini disusun untuk dapat dijadikan pedoman bagi Kepala Badan beserta pegawai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Kabupaten Belitung dalam penyelenggaraan urusan pemerintah bidang Kepegawaian dan Pendidikan dan Pelatihan. Jika di kemudian hari terdapat penyesuaian kebijakan pembangunan yang berdampak terhadap rencana strategis perangkat daerah maka akan dilakukan penyesuaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Akhirnya dengan tersusunnya Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Belitung Tahun 2025-2029 semoga dapat memberikan manfaat yang berguna bagi kemajuan pembangunan di Kabupaten Belitung, dan mampu mendorong pencapaian visi Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2025-2029 untuk mewujudkan Kabupaten Belitung semakin maju.

Tanjungpandan, September 2025

Plt. Kepala BKPSDM Kabupaten Belitung
Asisten Administrasi Umum,

Drs. SOEBAGIO
NIP 196610011995121001

LAMPIRAN - LAMPIRAN

**TABEL 3.3 TEKNIK MERUMUSKAN TUJUAN DAN SASARAN
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
5.03.5.04.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia											
- Terwujudnya Profesionalitas ASN	Meningkatnya Profesionalitas ASN serta Pengetahuan, Keahlian, dan Keterampilan ASN		Indeks Implementasi Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Manajemen ASN (Nilai)	88,28	88,30	88,35	88,40	88,45	88,50	88,55	
		Meningkatnya Penataan Sistim Manajemen SDM Aparatur	Persentase penempatan ASN sesuai kompetensi (%)	100	88	89	90	91	92	93	
		Meningkatnya Kompetensi ASN	Persentase ASN yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi Minimal 20 JP per Tahun (%)	48,59	51	52	53	54	55	56	

TABEL 4.2 TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	
5.03.5.04.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia								
- Terwujudnya Profesionalitas ASN	Meningkatnya Professionalitas ASN serta Pengetahuan, Keahlian, dan Keterampilan ASN				Indeks Implementasi Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Manajemen ASN (Nilai)			
					Persentase penempatan ASN sesuai kompetensi (%)			
					Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah (Nilai)	5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
					Nilai survey kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah (Nilai)	5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
					Nilai survey kepuasan pegawai terhadap pelayanan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur Perangkat Daerah (Nilai)	5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
					Persentase dokumen keuangan dan aset sesuai ketentuan (%)	5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
					Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah sesuai ketentuan (%)	5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
					Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5.03.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	5.03.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5.03.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	5.03.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Dokumen Keuangan dan Aset Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	5.03.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	5.03.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	5.03.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	5.03.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
				Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	5.03.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	5.03.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	5.03.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	5.03.01.2.05.0001 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	5.03.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	5.03.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
					Jenis Penyediaan Keperluan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	5.03.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		5.03.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)		5.03.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		5.03.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		5.03.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		5.03.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	5.03.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5.03.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5.03.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	5.03.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5.03.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5.03.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	5.03.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	5.03.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Barang Milik Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	5.03.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	5.03.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	5.03.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	5.03.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	5.03.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	5.03.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	5.03.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	5.03.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	5.03.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	5.03.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	5.03.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	5.03.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	5.03.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5.03.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5.03.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	5.03.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5.03.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5.03.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Meningkatnya Kualitas Layanan Kepegawaian		Persentase ASN dengan nilai prestasi kinerja Baik (%)	5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	
					Persentase penempatan pegawai sesuai kualifikasi (%)	5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	
					Persentase pengisian ASN berdasarkan formasi kebutuhan (%)	5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	
				Terlaksananya Pengelolaan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian (Dokumen)	5.03.02.2.01 - Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	5.03.02.2.01 - Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN (Dokumen)	5.03.02.2.01 - Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN (Dokumen)	5.03.02.2.01.0002 - Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	5.03.02.2.01.0010 - Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian (Dokumen)	5.03.02.2.01.0011 - Pengelolaan Data Kepegawaian	
				Terfasilitasinya Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi (Lembaga)	5.03.02.2.01 - Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	
					Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi (Lembaga)	5.03.02.2.01.0008 - Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	
				Dokumen Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah (Dokumen)	5.03.02.2.02 - Mutasi dan Promosi ASN	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN (Dokumen)	5.03.02.2.02 - Mutasi dan Promosi ASN	
					Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN (Dokumen)	5.03.02.2.02 - Mutasi dan Promosi ASN	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah (Dokumen)	5.03.02.2.02.0001 - Pengelolaan Mutasi ASN	
					Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN (Dokumen)	5.03.02.2.02.0002 - Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN (Dokumen)	5.03.02.2.02.0003 - Pengelolaan Promosi ASN	
				Laporan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan (Orang)	5.03.02.2.04 - Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	
					Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan (Orang)	5.03.02.2.04.0007 - Pembinaan Disiplin ASN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatnya pengembangan kompetensi ASN		Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi (%)	5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	
				ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan (Orang)	5.03.02.2.03 - Pengembangan Kompetensi ASN	
					Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center (Dokumen)	5.03.02.2.03 - Pengembangan Kompetensi ASN	
					Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center (Dokumen)	5.03.02.2.03.0002 - Pengelolaan Assessment Center	
					Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan (Orang)	5.03.02.2.03.0004 - Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	
		Meningkatnya Kompetensi ASN			Persentase ASN yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi Minimal 20 JP per Tahun (%)		
			Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi teknis, manajerial dan fungsional		Persentase Sumber Daya Aparatur Sipil Negara yang mengikuti pengembangan kompetensi teknis, manajerial dan fungsional (%)	5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
				ASN yang mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi (Orang)	5.04.02.2.01 - Pengembangan Kompetensi Teknis	
					Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi (Orang)	5.04.02.2.01.0003 - Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	
				ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan	5.04.02.2.02 - Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	
					Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan (Laporan)	5.04.02.2.02.0007 - Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	

**TABEL 4.1 PROGRAM PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.03 - KEPEGAWAIAN					8.009.686.782,04		15.673.650.000,00		14.467.930.000,00		14.050.750.000,00		14.358.750.000,00	
5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					7.106.251.074,04		9.987.650.000,00		8.575.750.000,00		8.230.750.000,00		8.380.750.000,00	
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah (Nilai)	70	80,15	80,15	7.106.251.074,04	80,93	9.987.650.000,00	81,20	8.575.750.000,00	81,87	8.230.750.000,00	82,56	8.380.750.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
	Nilai survey kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah (Nilai)			80		81		82		83		84		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
	Nilai survey kepuasan pegawai terhadap pelayanan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur Perangkat Daerah (Nilai)			80		81		82		83		84		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
	Persentase dokumen keuangan dan aset sesuai ketentuan (%)		100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah sesuai ketentuan (%)		100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					903.435.708,00		5.686.000.000,00		5.892.180.000,00		5.820.000.000,00		5.978.000.000,00	
Meningkatnya Kualitas Layanan Kepegawaian	Persentase ASN dengan nilai prestasi kinerja Baik (%)			82	517.935.708,00	83	2.786.000.000,00	84	2.853.000.000,00	85	2.920.000.000,00	85	2.978.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
	Persentase penempatan pegawai sesuai kualifikasi (%)			82		83		84		85		85		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
	Persentase pengisian ASN berdasarkan formasi kebutuhan (%)			84		86		88		90		91		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
Meningkatnya pengembangan kompetensi ASN	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi (%)			90	385.500.000,00	91	2.900.000.000,00	92	3.039.180.000,00	93	2.900.000.000,00	94	3.000.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					183.477.000,00		4.875.000.000,00		4.975.000.000,00		5.075.000.000,00		5.100.000.000,00	
5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					183.477.000,00		4.875.000.000,00		4.975.000.000,00		5.075.000.000,00		5.100.000.000,00	
Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi teknis, manajerial dan fungsional	Persentase Sumber Daya Aparatur Sipil Negara yang mengikuti pengembangan kompetensi teknis, manajerial dan fungsional (%)	49	51	52	183.477.000,00	53	4.875.000.000,00	54	4.975.000.000,00	55	5.075.000.000,00	60	5.100.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan Dan Pelatihan
TOTAL KESELURUHAN					8193163782.04		20548650000.00		19442930000.00		19125750000.00		19458750000.00	

**TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.03 - KEPEGAWAIAN				8.009.686.782,04		15.673.650.000,00		14.467.930.000,00		14.050.750.000,00		14.358.750.000,00		
5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				7.106.251.074,04		9.987.650.000,00		8.575.750.000,00		8.230.750.000,00		8.380.750.000,00		
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai survey kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah (Nilai)		80	7.106.251.074,04	81	9.987.650.000,00	82	8.575.750.000,00	83	8.230.750.000,00	84	8.380.750.000,00	5.03.5.04.0.00.01.00 00 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	Nilai survey kepuasan pegawai terhadap pelayanan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur Perangkat Daerah (Nilai)	80	81		82		83		84					
	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah sesuai ketentuan (%)	100	100		100		100		100					
	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah (Nilai)	70	80,15		81,20		81,87		82,56					
	Persentase dokumen keuangan dan aset sesuai ketentuan (%)	100	100		100		100		100					
5.03.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0,00		1.250.000,00		1.250.000,00		1.250.000,00		1.250.000,00		
Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	3	0	0,00	3	1.250.000,00	3	1.250.000,00	3	1.250.000,00	3	1.250.000,00		
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3	0		2		2		2		2			
5.03.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3	0	0,00	2	500.000,00	2	500.000,00	2	500.000,00	2	500.000,00		
5.03.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0,00		750.000,00		750.000,00		750.000,00		750.000,00		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	3	0	0,00	3	750.000,00	3	750.000,00	3	750.000,00	3	750.000,00		
5.03.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				6.379.608.742,04		6.350.500.000,00		6.400.500.000,00		6.450.500.000,00		6.450.500.000,00		
Dokumen Keuangan dan Aset Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	38	41	6.379.608.742,04	45	6.350.500.000,00	45	6.400.500.000,00	45	6.450.500.000,00	45	6.450.500.000,00		
	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	2	0		2		2		2		2			
5.03.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				6.379.608.742,04		6.350.000.000,00		6.400.000.000,00		6.450.000.000,00		6.450.000.000,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	38	41	6.379.608.742,04	45	6.350.000.000,00	45	6.400.000.000,00	45	6.450.000.000,00	45	6.450.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.03.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				8.059.155,00		18.000.000,00		19.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	8.059.155,00	1	18.000.000,00	1	19.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00		
5.03.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				38.209.530,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2	38.209.530,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00		
5.03.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				4.996.887,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1	4.996.887,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00		
5.03.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				55.500.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2	55.500.000,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00		
5.03.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				5.563.460,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	5.563.460,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00		
5.03.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				1.200.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	1	1.200.000,00	1	8.000.000,00	1	8.000.000,00	1	8.000.000,00	1	8.000.000,00		
5.03.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100.000.000,00		150.000.000,00		180.000.000,00		180.000.000,00		200.000.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	100.000.000,00	12	150.000.000,00	12	180.000.000,00	12	180.000.000,00	12	200.000.000,00		
5.03.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				0,00		1.765.900.000,00		577.000.000,00		177.000.000,00		280.000.000,00		
Barang Milik Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	0	0,00	150	1.765.900.000,00	8	577.000.000,00	8	177.000.000,00	8	280.000.000,00		
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	5	0		0		1		0		0			
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	29	0		76		10		10		10			
5.03.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0,00		0,00		400.000.000,00		0,00		0,00		
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	5	0	0,00	0	0,00	1	400.000.000,00	0	0,00	0	0,00		
5.03.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				0,00		404.000.000,00		27.000.000,00		27.000.000,00		30.000.000,00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	0	0,00	150	404.000.000,00	8	27.000.000,00	8	27.000.000,00	8	30.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.03.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		1.361.900.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		250.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	29	0	0,00	76	1.361.900.000,00	10	150.000.000,00	10	150.000.000,00	10	250.000.000,00		
5.03.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				339.154.800,00		433.000.000,00		433.000.000,00		433.000.000,00		444.000.000,00		
Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	4	339.154.800,00	4	433.000.000,00	4	433.000.000,00	4	433.000.000,00	4	444.000.000,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	4		4		4		4		4			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	4		4		4		4		4			
5.03.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.992.000,00		7.000.000,00		7.000.000,00		7.000.000,00		8.000.000,00		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	4	2.992.000,00	4	7.000.000,00	4	7.000.000,00	4	7.000.000,00	4	8.000.000,00		
5.03.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				203.450.000,00		270.000.000,00		270.000.000,00		270.000.000,00		280.000.000,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	4	203.450.000,00	4	270.000.000,00	4	270.000.000,00	4	270.000.000,00	4	280.000.000,00		
5.03.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				132.712.800,00		156.000.000,00		156.000.000,00		156.000.000,00		156.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	4	132.712.800,00	4	156.000.000,00	4	156.000.000,00	4	156.000.000,00	4	156.000.000,00		
5.03.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				93.958.500,00		775.000.000,00		475.000.000,00		475.000.000,00		495.000.000,00		
Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	175	26	93.958.500,00	175	775.000.000,00	175	475.000.000,00	175	475.000.000,00	185	495.000.000,00		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	17	22		20		20		20		20			
5.03.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				30.078.000,00		125.000.000,00		125.000.000,00		125.000.000,00		125.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	17	22	30.078.000,00	20	125.000.000,00	20	125.000.000,00	20	125.000.000,00	20	125.000.000,00		
5.03.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				25.030.500,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		170.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	175	26	25.030.500,00	175	150.000.000,00	175	150.000.000,00	175	150.000.000,00	185	170.000.000,00		
5.03.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				38.850.000,00		500.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	38.850.000,00	1	500.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00		
5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH				903.435.708,00		5.686.000.000,00		5.892.180.000,00		5.820.000.000,00		5.978.000.000,00		
Meningkatnya Kualitas Layanan Kepegawaian	Persentase ASN dengan nilai prestasi kinerja Baik (%)		82	517.935.708,00	83	2.786.000.000,00	84	2.853.000.000,00	85	2.920.000.000,00	85	2.978.000.000,00	5.03.5.04.0.00.01.00 00 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	Persentase penempatan pegawai sesuai kualifikasi (%)		82		83		84		85		85			
	Persentase pengisian ASN berdasarkan formasi kebutuhan (%)		84		86		88		90		91			
5.03.02.2.01 - Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN				285.233.708,00		2.090.000.000,00		2.140.000.000,00		2.190.000.000,00		2.190.000.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian (Dokumen)	1	0	234.032.708,00	1	890.000.000,00	1	940.000.000,00	1	990.000.000,00	1	990.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	1	0		1		1		1		1			
5.03.02.2.01.0002 - Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN				234.032.708,00		550.000.000,00		600.000.000,00		650.000.000,00		650.000.000,00		
Terlaksananya Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN (Dokumen)	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN (Dokumen)	1	1	234.032.708,00	1	550.000.000,00	1	600.000.000,00	1	650.000.000,00	1	650.000.000,00		
5.03.02.2.01.0010 - Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian				0,00		90.000.000,00		90.000.000,00		90.000.000,00		90.000.000,00		
Terkelolanya Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	1	0	0,00	1	90.000.000,00	1	90.000.000,00	1	90.000.000,00	1	90.000.000,00		
5.03.02.2.01.0011 - Pengelolaan Data Kepegawaian				0,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		
Terkelolanya Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian (Dokumen)	1	0	0,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00		
Terfasilitasinya Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi (Lembaga)	1	1	51.201.000,00	1	1.200.000.000,00	1	1.200.000.000,00	1	1.200.000.000,00	1	1.200.000.000,00		
5.03.02.2.01.0008 - Fasilitas Lembaga Profesi ASN				51.201.000,00		1.200.000.000,00		1.200.000.000,00		1.200.000.000,00		1.200.000.000,00		
Terfasilitasinya Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi (Lembaga)	1	1	51.201.000,00	1	1.200.000.000,00	1	1.200.000.000,00	1	1.200.000.000,00	1	1.200.000.000,00		
5.03.02.2.02 - Mutasi dan Promosi ASN				232.702.000,00		582.000.000,00		592.000.000,00		602.000.000,00		655.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Dokumen Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN (Dokumen)	2	1	232.702.000,00	1	582.000.000,00	1	592.000.000,00	1	602.000.000,00	1	655.000.000,00		
	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN (Dokumen)	0	0		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah (Dokumen)	1	4		4		4		4		4			
5.03.02.2.02.0001 - Pengelolaan Mutasi ASN				40.700.000,00		77.000.000,00		77.000.000,00		77.000.000,00		80.000.000,00		
Terlaksananya Mutasi ASN yang Meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah (Dokumen)	1	4	40.700.000,00	4	77.000.000,00	4	77.000.000,00	4	77.000.000,00	4	80.000.000,00		
5.03.02.2.02.0002 - Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				0,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN (Dokumen)	0	0	0,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00		
5.03.02.2.02.0003 - Pengelolaan Promosi ASN				192.002.000,00		430.000.000,00		440.000.000,00		450.000.000,00		500.000.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Pengembangan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN (Dokumen)	2	1	192.002.000,00	1	430.000.000,00	1	440.000.000,00	1	450.000.000,00	1	500.000.000,00		
5.03.02.2.04 - Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				0,00		114.000.000,00		121.000.000,00		128.000.000,00		133.000.000,00		
Laporan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan (Orang)	110	0	0,00	275	114.000.000,00	275	121.000.000,00	275	128.000.000,00	300	133.000.000,00		
5.03.02.2.04.0007 - Pembinaan Disiplin ASN				0,00		114.000.000,00		121.000.000,00		128.000.000,00		133.000.000,00		
Meningkatnya Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan (Orang)	110	0	0,00	275	114.000.000,00	275	121.000.000,00	275	128.000.000,00	300	133.000.000,00		
Meningkatnya pengembangan kompetensi ASN	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi (%)		90	385.500.000,00	91	2.900.000.000,00	92	3.039.180.000,00	93	2.900.000.000,00	94	3.000.000.000,00		
5.03.02.2.03 - Pengembangan Kompetensi ASN				385.500.000,00		2.900.000.000,00		3.039.180.000,00		2.900.000.000,00		3.000.000.000,00		
ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan (Orang)	22	5	385.500.000,00	20	2.900.000.000,00	20	3.039.180.000,00	20	2.900.000.000,00	20	3.000.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center (Dokumen)	0	0		1		1		1		1			
5.03.02.2.03.0002 - Pengelolaan Assessment Center				0,00		900.000.000,00		1.039.180.000,00		900.000.000,00		1.000.000.000,00		
Terkelolanya Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center (Dokumen)	0	0	0,00	1	900.000.000,00	1	1.039.180.000,00	1	900.000.000,00	1	1.000.000.000,00		
5.03.02.2.03.0004 - Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN				385.500.000,00		2.000.000.000,00		2.000.000.000,00		2.000.000.000,00		2.000.000.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan (Orang)	22	5	385.500.000,00	20	2.000.000.000,00	20	2.000.000.000,00	20	2.000.000.000,00	20	2.000.000.000,00		
5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				183.477.000,00		4.875.000.000,00		4.975.000.000,00		5.075.000.000,00		5.100.000.000,00		
5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				183.477.000,00		4.875.000.000,00		4.975.000.000,00		5.075.000.000,00		5.100.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi teknis, manajerial dan fungsional	Persentase Sumber Daya Aparatur Sipil Negara yang mengikuti pengembangan kompetensi teknis, manajerial dan fungsional (%)	49	52	183.477.000,00	53	4.875.000.000,00	54	4.975.000.000,00	55	5.075.000.000,00	60	5.100.000.000,00	5.03.5.04.0.00.01.00 00 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		
5.04.02.2.01 - Pengembangan Kompetensi Teknis				84.693.000,00		675.000.000,00		675.000.000,00		675.000.000,00		700.000.000,00			
ASN yang mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi (Orang)	184	8	84.693.000,00	160	675.000.000,00	160	675.000.000,00	160	675.000.000,00	175	700.000.000,00			
5.04.02.2.01.0003 - Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum				84.693.000,00		675.000.000,00		675.000.000,00		675.000.000,00		700.000.000,00			
Terlaksananya Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi (Orang)	184	8	84.693.000,00	160	675.000.000,00	160	675.000.000,00	160	675.000.000,00	175	700.000.000,00			
5.04.02.2.02 - Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional				98.784.000,00		4.200.000.000,00		4.300.000.000,00		4.400.000.000,00		4.400.000.000,00			
ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan (Laporan)	1	1	98.784.000,00	1	4.200.000.000,00	1	4.300.000.000,00	1	4.400.000.000,00	1	4.400.000.000,00			
5.04.02.2.02.0007 - Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan				98.784.000,00		4.200.000.000,00		4.300.000.000,00		4.400.000.000,00		4.400.000.000,00			
Terselenggaranya Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan (Laporan)	1	1	98.784.000,00	1	4.200.000.000,00	1	4.300.000.000,00	1	4.400.000.000,00	1	4.400.000.000,00			

**TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN PER LOKASI DAN PENDANAAN
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN	
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET				PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
5.03 - KEPEGAWAIAN					8.009.686.782,04		15.673.650.000,00		14.467.930.000,00		14.050.750.000,00		14.358.750.000,00			
5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					7.106.251.074,04		9.987.650.000,00		8.575.750.000,00		8.230.750.000,00		8.380.750.000,00			
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai survey kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah (Nilai)			80	7.106.251.074,04	81	9.987.650.000,00	82	8.575.750.000,00	83	8.230.750.000,00	84	8.380.750.000,00	5.03.5.04.0.00.01.00 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		
	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah (Nilai)	70	80,15	80,15		80,93		81,20		81,87		82,56				
	Nilai survey kepuasan pegawai terhadap pelayanan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur Perangkat Daerah (Nilai)			80		81		82		83		84				
	Persentase dokumen keuangan dan aset sesuai ketentuan (%)		100	100		100		100		100		100				
	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah sesuai ketentuan (%)		100	100		100		100		100		100				
5.03.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					0,00		1.250.000,00		1.250.000,00		1.250.000,00		1.250.000,00			
Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	3	0	0	0,00	3	1.250.000,00	3	1.250.000,00	3	1.250.000,00	3	1.250.000,00			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3	0	0		2		2		2		2				
5.03.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					0,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00		Tanjung Pandan	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3	0	0	0,00	2	500.000,00	2	500.000,00	2	500.000,00	2	500.000,00			
5.03.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					0,00		750.000,00		750.000,00		750.000,00		750.000,00		Tanjung Pandan	
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	3	0	0	0,00	3	750.000,00	3	750.000,00	3	750.000,00	3	750.000,00			
5.03.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					6.379.608.742,04		6.350.500.000,00		6.400.500.000,00		6.450.500.000,00		6.450.500.000,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Dokumen Keuangan dan Aset Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	38	41	41	6.379.608.742,04	45	6.350.500.000,00	45	6.400.500.000,00	45	6.450.500.000,00	45	6.450.500.000,00			
	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	2	0	0		2		2		2		2				
5.03.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					6.379.608.742,04		6.350.000.000,00		6.400.000.000,00		6.450.000.000,00		6.450.000.000,00		Tanjung Pandan	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	38	41	41	6.379.608.742,04	45	6.350.000.000,00	45	6.400.000.000,00	45	6.450.000.000,00	45	6.450.000.000,00			
5.03.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					0,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00		Tanjung Pandan	
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	2	0	0	0,00	2	500.000,00	2	500.000,00	2	500.000,00	2	500.000,00			
5.03.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					80.000.000,00		231.000.000,00		227.000.000,00		231.000.000,00		227.000.000,00			
Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	0	0	0	80.000.000,00	1	231.000.000,00	0	227.000.000,00	1	231.000.000,00	0	227.000.000,00			
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	6	3	5		15		15		15		15				
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	0	0		1		1		1		1				
5.03.01.2.05.0001 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai					0,00		4.000.000,00		0,00		4.000.000,00		0,00		Tanjung Pandan	
Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	0	0	0	0,00	1	4.000.000,00	0	0,00	1	4.000.000,00	0	0,00			
5.03.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya					0,00		27.000.000,00		27.000.000,00		27.000.000,00		27.000.000,00		Tanjung Pandan	
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	0	0	0,00	1	27.000.000,00	1	27.000.000,00	1	27.000.000,00	1	27.000.000,00			
5.03.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					80.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		Tanjung Pandan	
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	6	3	5	80.000.000,00	15	200.000.000,00	15	200.000.000,00	15	200.000.000,00	15	200.000.000,00			
5.03.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah					213.529.032,00		431.000.000,00		462.000.000,00		463.000.000,00		483.000.000,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Jenis Penyediaan Keperluan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	1	1	213.529.032,00	1	431.000.000,00	1	462.000.000,00	1	463.000.000,00	1	483.000.000,00			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	1		1		1		1		1				
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2	2		2		2		2		2				
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	12		12		12		12		12				
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	1		1		1		1		1				
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1	1		1		1		1		1				
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2	2		2		2		2		2				
5.03.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					8.059.155,00		18.000.000,00		19.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		Tanjung Pandan	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	1	8.059.155,00	1	18.000.000,00	1	19.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00			
5.03.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					38.209.530,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		Tanjung Pandan	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2	2	38.209.530,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00			
5.03.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					4.996.887,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		Tanjung Pandan	
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1	1	4.996.887,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00			
5.03.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor					55.500.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		Tanjung Pandan	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2	2	55.500.000,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00			
5.03.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					5.563.460,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		Tanjung Pandan	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN	
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET				PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	1	5.563.460,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00			
5.03.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					1.200.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00		Tanjung Pandan	
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	1	1	1.200.000,00	1	8.000.000,00	1	8.000.000,00	1	8.000.000,00	1	8.000.000,00			
5.03.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					100.000.000,00		150.000.000,00		180.000.000,00		180.000.000,00		200.000.000,00		Tanjung Pandan	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	12	100.000.000,00	12	150.000.000,00	12	180.000.000,00	12	180.000.000,00	12	200.000.000,00			
5.03.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					0,00		1.765.900.000,00		577.000.000,00		177.000.000,00		280.000.000,00			
Barang Milik Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	5	0	0	0,00	0	1.765.900.000,00	1	577.000.000,00	0	177.000.000,00	0	280.000.000,00			
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	29	0	0		76		10	10	10	10					
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	0	0		150		8	8	8	8					
5.03.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					0,00		0,00		400.000.000,00		0,00		0,00		Tanjung Pandan	
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	5	0	0	0,00	0	0,00	1	400.000.000,00	0	0,00	0	0,00			
5.03.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel					0,00		404.000.000,00		27.000.000,00		27.000.000,00		30.000.000,00		Tanjung Pandan	
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	0	0	0,00	150	404.000.000,00	8	27.000.000,00	8	27.000.000,00	8	30.000.000,00			
5.03.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					0,00		1.361.900.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		250.000.000,00		Tanjung Pandan	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	29	0	0	0,00	76	1.361.900.000,00	10	150.000.000,00	10	150.000.000,00	10	250.000.000,00			
5.03.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					339.154.800,00		433.000.000,00		433.000.000,00		433.000.000,00		444.000.000,00			
Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12	4	339.154.800,00	4	433.000.000,00	4	433.000.000,00	4	433.000.000,00	4	444.000.000,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	4		4		4		4		4				
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	4		4		4		4		4				
5.03.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat					2.992.000,00		7.000.000,00		7.000.000,00		7.000.000,00		8.000.000,00		Tanjung Pandan	
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12	4	2.992.000,00	4	7.000.000,00	4	7.000.000,00	4	7.000.000,00	4	8.000.000,00			
5.03.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					203.450.000,00		270.000.000,00		270.000.000,00		270.000.000,00		280.000.000,00		Tanjung Pandan	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	4	203.450.000,00	4	270.000.000,00	4	270.000.000,00	4	270.000.000,00	4	280.000.000,00			
5.03.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					132.712.800,00		156.000.000,00		156.000.000,00		156.000.000,00		156.000.000,00		Tanjung Pandan	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	4	132.712.800,00	4	156.000.000,00	4	156.000.000,00	4	156.000.000,00	4	156.000.000,00			
5.03.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					93.958.500,00		775.000.000,00		475.000.000,00		475.000.000,00		495.000.000,00			
Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	1	93.958.500,00	1	775.000.000,00	1	475.000.000,00	1	475.000.000,00	1	495.000.000,00			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	175	79	26		175		175		175		185				
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	17	22	22		20		20		20		20				
5.03.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					30.078.000,00		125.000.000,00		125.000.000,00		125.000.000,00		125.000.000,00		Tanjung Pandan	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan dipayarkan Pajaknya (Unit)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	17	22	22	30.078.000,00	20	125.000.000,00	20	125.000.000,00	20	125.000.000,00	20	125.000.000,00			
5.03.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					25.030.500,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		170.000.000,00		Tanjung Pandan	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	175	79	26	25.030.500,00	175	150.000.000,00	175	150.000.000,00	175	150.000.000,00	185	170.000.000,00			
5.03.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					38.850.000,00		500.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		Tanjung Pandan	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	1	38.850.000,00	1	500.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00			
5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					903.435.708,00		5.686.000.000,00		5.892.180.000,00		5.820.000.000,00		5.978.000.000,00			
Meningkatnya Kualitas Layanan Kepegawaian	Persentase ASN dengan nilai prestasi kinerja Baik (%)			82	517.935.708,00	83	2.786.000.000,00	84	2.853.000.000,00	85	2.920.000.000,00	85	2.978.000.000,00	5.03.5.04.0.00.01.00 00 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		
	Persentase pengisian ASN berdasarkan formasi kebutuhan (%)			84		86		88	90	91						
	Persentase penempatan pegawai sesuai kualifikasi (%)			82		83		84	85	85						
5.03.02.2.01 - Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN					285.233.708,00		2.090.000.000,00		2.140.000.000,00		2.190.000.000,00		2.190.000.000,00			
Terlaksananya Pengelolaan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian (Dokumen)	1	1	0	234.032.708,00	1	890.000.000,00	1	940.000.000,00	1	990.000.000,00	1	990.000.000,00			
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	1	1	0		1		1		1						
	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN (Dokumen)	1	1	1		1		1		1						
5.03.02.2.01.0002 - Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN					234.032.708,00		550.000.000,00		600.000.000,00		650.000.000,00		650.000.000,00		Tanjung Pandan	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Terlaksananya Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN (Dokumen)	1	1	1	234.032.708,00	1	550.000.000,00	1	600.000.000,00	1	650.000.000,00	1	650.000.000,00			
5.03.02.2.01.0010 - Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian					0,00		90.000.000,00		90.000.000,00		90.000.000,00		90.000.000,00		Tanjung Pandan	
Terkelolanya Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	1	1	0	0,00	1	90.000.000,00	1	90.000.000,00	1	90.000.000,00	1	90.000.000,00			
5.03.02.2.01.0011 - Pengelolaan Data Kepegawaian					0,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		Tanjung Pandan	
Terkelolanya Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian (Dokumen)	1	1	0	0,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00			
Terfasilitasinya Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi (Lembaga)	1	1	1	51.201.000,00	1	1.200.000.000,00	1	1.200.000.000,00	1	1.200.000.000,00	1	1.200.000.000,00			
5.03.02.2.01.0008 - Fasilitas Lembaga Profesi ASN					51.201.000,00		1.200.000.000,00		1.200.000.000,00		1.200.000.000,00		1.200.000.000,00		Tanjung Pandan	
Terfasilitasinya Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi (Lembaga)	1	1	1	51.201.000,00	1	1.200.000.000,00	1	1.200.000.000,00	1	1.200.000.000,00	1	1.200.000.000,00			
5.03.02.2.02 - Mutasi dan Promosi ASN					232.702.000,00		582.000.000,00		592.000.000,00		602.000.000,00		655.000.000,00			
Dokumen Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN (Dokumen)	0	0	0	232.702.000,00	1	582.000.000,00	1	592.000.000,00	1	602.000.000,00	1	655.000.000,00			
	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah (Dokumen)	1	4	4		4		4		4		4				
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN (Dokumen)	2	1	1		1		1		1		1				
5.03.02.2.02.0001 - Pengelolaan Mutasi ASN					40.700.000,00		77.000.000,00		77.000.000,00		77.000.000,00		80.000.000,00		Tanjung Pandan	
Terlaksananya Mutasi ASN yang Meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah (Dokumen)	1	4	4	40.700.000,00	4	77.000.000,00	4	77.000.000,00	4	77.000.000,00	4	80.000.000,00			
5.03.02.2.02.0002 - Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN					0,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		Tanjung Pandan	
Terlaksananya Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN (Dokumen)	0	0	0	0,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
5.03.02.2.02.0003 - Pengelolaan Promosi ASN					192.002.000,00		430.000.000,00		440.000.000,00		450.000.000,00		500.000.000,00		Kota , Tanjung Pandan	
Terlaksananya Pengelolaan Pengembangan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN (Dokumen)	2	1	1	192.002.000,00	1	430.000.000,00	1	440.000.000,00	1	450.000.000,00	1	500.000.000,00			
5.03.02.2.04 - Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur					0,00		114.000.000,00		121.000.000,00		128.000.000,00		133.000.000,00			
Laporan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan (Orang)	110	0	0	0,00	275	114.000.000,00	275	121.000.000,00	275	128.000.000,00	300	133.000.000,00			
5.03.02.2.04.0007 - Pembinaan Disiplin ASN					0,00		114.000.000,00		121.000.000,00		128.000.000,00		133.000.000,00		Tanjung Pandan	
Meningkatnya Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan (Orang)	110	0	0	0,00	275	114.000.000,00	275	121.000.000,00	275	128.000.000,00	300	133.000.000,00			
Meningkatnya pengembangan kompetensi ASN	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi (%)			90	385.500.000,00	91	2.900.000.000,00	92	3.039.180.000,00	93	2.900.000.000,00	94	3.000.000.000,00			
5.03.02.2.03 - Pengembangan Kompetensi ASN					385.500.000,00		2.900.000.000,00		3.039.180.000,00		2.900.000.000,00		3.000.000.000,00			
ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan (Orang)	22	17	5	385.500.000,00	20	2.900.000.000,00	20	3.039.180.000,00	20	2.900.000.000,00	20	3.000.000.000,00			
	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center (Dokumen)	0	0	0		1		1		1						
5.03.02.2.03.0002 - Pengelolaan Assessment Center					0,00		900.000.000,00		1.039.180.000,00		900.000.000,00		1.000.000.000,00		Tanjung Pandan	
Terkelolanya Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center (Dokumen)	0	0	0	0,00	1	900.000.000,00	1	1.039.180.000,00	1	900.000.000,00	1	1.000.000.000,00			
5.03.02.2.03.0004 - Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN					385.500.000,00		2.000.000.000,00		2.000.000.000,00		2.000.000.000,00		2.000.000.000,00		Tanjung Pandan	
Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan (Orang)	22	17	5	385.500.000,00	20	2.000.000.000,00	20	2.000.000.000,00	20	2.000.000.000,00	20	2.000.000.000,00			
5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					183.477.000,00		4.875.000.000,00		4.975.000.000,00		5.075.000.000,00		5.100.000.000,00			
5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					183.477.000,00		4.875.000.000,00		4.975.000.000,00		5.075.000.000,00		5.100.000.000,00			
Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi teknis, manajerial dan fungsional	Persentase Sumber Daya Aparatur Sipil Negara yang mengikuti pengembangan kompetensi teknis, manajerial dan fungsional (%)	49	51	52	183.477.000,00	53	4.875.000.000,00	54	4.975.000.000,00	55	5.075.000.000,00	60	5.100.000.000,00	5.03.5.04.0.00.01.00 00 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		
5.04.02.2.01 - Pengembangan Kompetensi Teknis					84.693.000,00		675.000.000,00		675.000.000,00		675.000.000,00		700.000.000,00			
ASN yang mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi (Orang)	184	17	8	84.693.000,00	160	675.000.000,00	160	675.000.000,00	160	675.000.000,00	175	700.000.000,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
5.04.02.2.01.0003 - Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum					84.693.000,00		675.000.000,00		675.000.000,00		675.000.000,00		700.000.000,00		Tanjung Pandan	
Terlaksananya Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi (Orang)	184	17	8	84.693.000,00	160	675.000.000,00	160	675.000.000,00	160	675.000.000,00	175	700.000.000,00			
5.04.02.2.02 - Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional					98.784.000,00		4.200.000.000,00		4.300.000.000,00		4.400.000.000,00		4.400.000.000,00			
ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan (Laporan)	1	1	1	98.784.000,00	1	4.200.000.000,00	1	4.300.000.000,00	1	4.400.000.000,00	1	4.400.000.000,00			
5.04.02.2.02.0007 - Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan					98.784.000,00		4.200.000.000,00		4.300.000.000,00		4.400.000.000,00		4.400.000.000,00		Tanjung Pandan	
Terseleenggaranya Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan (Laporan)	1	1	1	98.784.000,00	1	4.200.000.000,00	1	4.300.000.000,00	1	4.400.000.000,00	1	4.400.000.000,00			

**TABEL 4.3 INDIKATOR KINERJA DAERAH
RANCANGAN AKHIR
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG**

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
5.03.5.04.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia										
I	ASPEK PELAYANAN UMUM									
1	Indeks Implementasi Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Manajemen ASN	Nilai	88,28	88,30	88,35	88,40	88,45	88,50	88,55	
2	Persentase penempatan ASN sesuai kompetensi	%	100	88	89	90	91	92	93	
3	Persentase ASN yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi Minimal 20 JP per Tahun	%	48,59	51	52	53	54	55	56	
II	INDIKATOR KINERJA KUNCI									
1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	-	82,75	82,80	82,85	82,90	82,95	83	
2	Rasio Pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	-	28,95	29	29,05	29,10	29,15	29,20	
3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	-	59,05	59,10	59,15	59,20	59,25	59,30	

**TABEL 4.4 DAFTAR SUBKEGIATAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN DAERAH RANCANGAN AKHIR RENSTRA
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG**

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>
	NIHIL			

**TABEL 4.5 INDIKATOR KINERJA UTAMA
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG**

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	5.03.5.04.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia									
2.	Indeks Implementasi Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Manajemen ASN	Nilai	88,28	88,30	88,35	88,40	88,45	88,50	88,55	
3.	Persentase penempatan ASN sesuai kompetensi	%	100	88	89	90	91	92	93	
4.	Persentase ASN yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi Minimal 20 JP per Tahun	%	48,59	51	52	53	54	55	56	

**TABEL 4.6 INDIKATOR KINERJA KUNCI
RANCANGAN AKHIR RENSTRA
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG**

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	5.03 - KEPEGAWAIAN										
2.	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	positif	%	-	59,05	59,10	59,15	59,20	59,25	59,30	
3.	Rasio Pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	positif	%	-	28,95	29	29,05	29,10	29,15	29,20	
4.	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	positif	%	-	82,75	82,80	82,85	82,90	82,95	83	